



PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA
PALABUHANRATU



2024

LAPORAN TAHUNAN

☎ (0266) 431307

✉ PPN.RATU@GMAIL.COM

📍 JL SILIWANGI NO 57 PALABUHANRATU

🌐 PPN PALABUHANRATU

hiji
JUARA
JUJUR UNGGUL AMANAH RAMAH AKUNTABEL
HARMONIS INOVATIF JELAS INSPIRATIF

KATA PENGANTAR

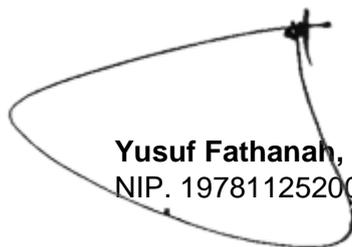
Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga Laporan Tahunan Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu Tahun 2024 dapat diselesaikan.

Penyusunan Laporan Tahunan Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu ini merupakan bagian dari evaluasi pelaksanaan program kegiatan Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu tahun 2024 yang menyajikan data kondisi dan potensi pelabuhan serta pencapaian hasil-hasil yang dicapai dalam berbagai pembangunan dan kegiatan melalui dukungan dana dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).

Kami menyadari dalam penyajian Laporan ini masih banyak ditemukan kekurangan, oleh karena itu kritik dan saran sangat kami perlukan dalam penyempurnaan dan perbaikan kedepannya. Kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan laporan ini disampaikan ucapan terima kasih dan sekaligus diminta agar dapat mempertahankan kerjasama yang baik dan meningkatkan partisipasinya dalam usaha penerbitan publikasi yang sama di tahun mendatang.

Semoga Laporan Tahunan ini dapat bermanfaat dalam mendukung pembangunan dan kegiatan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu. Demikian semoga Tuhan Yang Maha Esa menyertai dan memberkahi usaha dan pengabdian kita terhadap Nusa dan Bangsa.

Kepala Pelabuhan Perikanan
Nusantara Palabuhanratu

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized loop that starts at the top right, goes down, then loops back up and around to the left, ending with a small vertical stroke at the top right.

Yusuf Fathanah, S. Pi., M.Si.
NIP. 197811252003121003

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR GAMBAR	v
DAFTAR TABEL	vii
1. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Tujuan	2
2. KERAGAAN PPN PALABUHANRATU	3
2.1. Tugas, Fungsi, & Susunan Organisasi	3
2.2. Komposisi Pegawai	5
2.3. Korespondensi	6
3. CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA & PENGANGGARAN ..	8
3.1. Produksi Perikanan	8
3.2. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	10
3.3. Target & Capaian Indikator Kinerja Tahun 2024.....	14
3.4. Alokasi Anggaran	16
3.5. Realisasi Anggaran	16
4. KERAGAAN OPERASIONAL	18
4.1. Kegiatan Operasional Pelabuhan Perikanan	18
4.1.1. Produksi Ikan	18
4.1.2. Masyarakat Perikanan.....	23
4.1.3. Pembinaan Mutu Hasil Perikanan	24
4.1.4. Pelaksanaan Sistem Informasi Pelabuhan Perikanan ...	28
4.2. Kesyahbandaran di Pelabuhan Perikanan.....	30
4.2.1. Penertiban & Penataan Kapal Perikanan	31
4.2.2. Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (SPB)	34
4.2.3. Penerbitan STBLKK	40
4.2.4. Penerbitan SHTI.....	46
4.2.5. Kegiatan Pengecekan Kelaikan Kapal Perikanan.....	52
4.2.6. Sertifikat Kecakapan Nelayan.....	58
4.2.7. Memeriksa Logbook Penangkapan Ikan.....	60
4.2.8. Pengawasan dan Monitoring Pelaksanaan PNBP Pasca Produksi.....	63
4.2.9. Penataan Kolam Pelabuhan.....	65
4.2.10. Pengukuran Kapal Perikanan.....	66
4.3. Fasilitas Pelabuhan Perikanan	69
4.3.1. Fasilitas Pokok	69
4.3.2. Fasilitas Fungsional	71
4.3.3. Fasilitas Penunjang	73
5. PENUTUP	77

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
1. Struktur Organisasi PPN Palabuhanratu Tahun 2022.....	5
2. Grafik Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan.....	6
3. Grafik Pegawai Berdasarkan Golongan.....	6
4. Kegiatan Surat Menyurat di Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu Tahun 2024.....	7
5. Jumlah dan nilai produksi perikanan tangkap di PPN Palabuhanratu Tahun 2024.....	9
6. Jumlah produksi perikanan di PPN Palabuhanratu Tahun 2020 - 2024.....	10
7. Realisasi Nilai PNBP di PPN Palabuhanratu Tahun 2020-2024.....	13
8. Volume dan nilai produksi Ikan di PPN Palabuhanratu Tahun 1993-2024.....	19
9. Volume Produksi Ikan Cakalang dan Tongkol di PPN Palabuhanratu Tahun 2020 – 2024.....	19
10. Volume Produksi Ikan Layaran dan Layur Di PPN Palabuhanratu Tahun 2020 – 2024.....	20
11. Volume Produksi Ikan Tuna dan Tembang DiPPN Palabuhanratu Tahun 2020 – 2024.....	21
12. Volume Produksi Ikan Lewat Darat ke PPN Palabuhanratu Tahun 2024.....	22
13. Pola Pemasaran Ikan di PPN Palabuhanratu.....	23
14. Jumlah Nelayan di PPN Palabuhanratu Tahun 2015 - 2024.....	24
15. Inspeksi Pembongkaran Ikan Tahun 2024.....	25
16. Pengujian Mutu Ikan di Laboratorium.....	26
17. Monitoring sanitasi <i>hygiene</i> TPI dan Sentra Pemasaran Ikan.....	27
18. Tampilan PIPP pada laman pipp.kkp.go.id	29
19. Persentase Kapal Beraktifitas di PPN Palabuhanratu.....	32
20. Jumlah Kapal Per Tahun PPN Palabuhanratu.....	33
21. SOP Penerbitan SPB.....	35
22. Sebaran Bulanan Penerbitan SPB.....	36

23.	Sebaran Persentase Penerbitan SPB Berdasarkan Kelompok GT Kapal.....	37
24.	Sebaran Persentase API.....	39
25.	SOP Penerbitan Dokumen STBLKK	41
26.	Penerbitan Dokumen STBLKK Perbulan.....	42
27.	Persentase Penerbitan STBL-K Berdasarkan Ukuran Kapal	43
28.	Persentase Penerbitan STBL-K Berdasarkan API	44
29.	Jumlah Penerbitan STBLK 5 tahun terakhir	45
30.	Alur Prosedur penerbitan SHTI	47
31.	Volume Produksi LA Berdasarkan Jenis Ikan	50
32.	Volume Produksi LT Berdasarkan Jenis Ikan	51
33.	Volume Produksi LTS Berdasarkan Jenis Ikan	51
34.	Bimtek SKN PPN Palabuhanratu	59
35.	Bimtek SKN Aspirasi	59
37.	Jumlah Dokumen Logbook Sepanjang 2024.....	63
38.	Sosialisasi dan Evaluasi PNBK Pasca Produksi di PP. Binuangen.....	64
39.	Sosialisasi dan Evaluasi Proses Bisnis Level 3 PNBK Pasca Produksi.....	64
40.	Penerimaan PNBK Pasca Produksi per Bulan.....	65
41.	Pengangkatan Bangkai Kapal.....	66
42.	Sosialisasi Pengukuran dan Pengukuran Kapal di PP Jayanti.....	68
43.	Sosialisasi Pengukuran dan Pengukuran Kapal di Cianjur.....	68
44.	Areal PPN Palabuhanratu.....	70
45.	Dermaga PPN Palabuhanratu	71
46.	Kantor Administrasi PPN Palabuhanratu.....	72
47.	TPI Higienis PPN Palabuhanratu.....	72
48.	Gedung Pemasaran Ikan dan Resto	74
49.	Mesjid Nelayan	75

DAFTAR TABEL

	Halaman
1. Komposisi ASN Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu Tahun 2024.....	6
2. Target dan Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Pada PPN Palabuhanratu Tahun 2024.....	11
3. Target dan Capaian Indikator Kinerja PPN Palabuhanratu Tahun 2024.....	14
4. Rincian Alokasi Anggaran PPN Palabuhanratu Berdasarkan Kegiatan Tahun Anggaran 2024.....	16
5. Perbandingan Antara Realisasi Anggaran Terhadap Pagu Anggaran di PPN Palabuhanratu Berdasarkan Jenis Belanja Tahun Anggaran 2024.....	17
6. Jumlah Kapal Berpangkalan di PPN Palabuhanratu Tahun 2024..	31
7. Jumlah Kapal berdasarkan API Tahun 2024.....	32
8. Jumlah Kapal PPN Palabuhanratu Tahun 2024.....	33
9. Penerbitan SPB Periode Januari-Desember Tahun 2024.....	35
10. Penerbitan SPB berdasarkan Ukuran Kapal (GT).....	37
11. Penerbitan SPB berdasarkan Alat Tangkap.....	39
12. Penerbitan STBL Kedatangan Periode Januari-Desember Tahun 2024.....	41
13. Jumlah STBL Kedatangan berdasarkan Ukuran Kapal (GT).....	43
14. Penerbitan STBL Kedatangan berdasarkan Alat Tangkap.....	44
15. Jumlah SHTI Tahun 2024.....	48
16. Jumlah Produksi SHTI.....	48
17. Volume Produksi Ikan per Jenis SHTI dan Dokumen Lembar Awal.....	49
18. List Pengecekan Kelaikan Kapal Perikanan Melalui Surat Edaran.....	52
19. Laporan Logbook Tahun 2024.....	62
20. Fasilitas Pokok di PPN Palabuhanratu.....	69
21. Penyerapan BBM Solar Subsidi PPN Palabuhanratu.....	63

	Halaman
22. Fasilitas Fungsional di PPN Palabuhanratu.....	71
23. Fasilitas Penunjang di PPN Palabuhanratu.....	73
24. Pemanfaatan Lahan dan Bangunan Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu Untuk Fasilitas Operasional Pelabuhan Tahun 2024.....	75
25. Pemanfaatan Lahan dan Bangunan Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu Untuk Industri Eksisting Tahun 2024.....	76

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Wilayah perairan Indonesia memiliki potensi perikanan yang menjanjikan, sumber daya ikan yang hidup di wilayah perairan Indonesia dinilai memiliki tingkat keragaman hayati (*biodiversity*) tinggi. Di wilayah perairan laut Indonesia terdapat beberapa jenis ikan bernilai ekonomis tinggi antara lain: tuna, cakalang, udang, tongkol, tenggiri, kakap, cumi-cumi, ikan-ikan karang, ikan hias dan kekerangan termasuk rumput laut. Untuk memanfaatkan sumber daya tersebut pemerintah telah membangun prasarana perikanan seperti pelabuhan perikanan dan tempat-tempat pendaratan ikan yang tersebar di berbagai wilayah yang diharapkan dapat mempermudah pendaratan dan memperlancar proses bisnis perikanan.

Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu berada di Teluk Palabuhanratu yang merupakan bagian dari perairan Samudera Hindia (WPP-RI 573). Dilatarbelakangi potensi perikanan di sekitar Palabuhanratu yang besar, maka dibangunlah Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Palabuhanratu pada tahun 1991 – 1993 dengan dana pembangunan pada tahap awal bersumber dari *Asian Development Bank* (ADB) dan *Islamic Development Bank* (ISDB) dan pada tanggal 18 Februari 1993 diresmikan operasionalnya oleh Presiden RI ke-2 Bapak Jenderal (Purn) H.M. Soeharto.

PPN Palabuhanratu sebagai salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap selain menjalankan fungsi pelabuhan perikanan juga menjadi ujung tombak dalam implementasi program dan kegiatan prioritas. Dalam rangka mendukung kegiatan prioritas Kementerian Kelautan dan Perikanan, Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap melakukan beberapa terobosan dan upaya langkah percepatan yaitu Kebijakan Penangkapan Ikan Terukur, Pelaksanaan Pemungutan PNBP Pasca Produksi, Pemberdayaan Nelayan melalui Bantuan Pemerintah, Pengembangan Pelabuhan Perikanan, dan Pengembangan Kampung Nelayan Maju. Berbagai upaya terobosan dan akselerasi pembangunan perikanan tangkap selanjutnya diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat, penyerapan lapangan pekerjaan, pendapatan, serta tingkat konsumsi ikan, yang

pada akhirnya akan memperkuat struktur ekonomi nasional yang kokoh dan maju serta turut serta dalam mewujudkan tata kelola perikanan tangkap yang berkelanjutan.

Dengan semangat baru, PPN Palabuhanratu melaksanakan program dan kegiatan secara terpadu dan kolaborasi, termasuk berbagai inovasi. Hasil kinerja pun dapat dirasakan, sebagaimana yang sebagian terangkum dalam buku ini. Diharapkan buku ini dapat menyajikan informasi dan memberikan gambaran singkat mengenai kegiatan yang telah dilaksanakan oleh PPN Palabuhanratu selama tahun 2024 berdasarkan tugas pokok dan fungsinya serta pencapaian kinerja dari masing-masing kegiatan.

1.2. Tujuan

Tujuan penyusunan buku laporan tahunan pelaksanaan kegiatan PPN Palabuhanratu adalah untuk menyampaikan informasi pencapaian program dan kegiatan dalam upaya meningkatkan pengelolaan kinerja kedepannya sekaligus untuk mendapatkan umpan balik dari *stakeholders* perikanan.

BAB II

KERAGAAN PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA PALABUHANRATU

2.1. Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi

Organisasi dan tata kerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu mengacu pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No: 5/PERMEN-KP/2024 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan. Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Perikanan Tangkap yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Perikanan Tangkap. UPT pelabuhan perikanan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan dan pelayanan pemanfaatan sumber daya ikan serta keselamatan operasional kapal perikanan. Dalam melaksanakan tugas dimaksud, UPT pelabuhan perikanan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan, pemantauan, dan evaluasi rencana, program, dan anggaran, serta pelaporan di bidang pelabuhan perikanan;
- b. pelaksanaan pengaturan keberangkatan, kedatangan, dan keberadaan kapal perikanan di pelabuhan perikanan;
- c. pelaksanaan pelayanan penerbitan surat tanda bukti lapor kedatangan dan keberangkatan kapal perikanan;
- d. pelaksanaan pemeriksaan logbook penangkapan ikan;
- e. pelaksanaan pelayanan penerbitan persetujuan berlayar;
- f. pelaksanaan penerbitan sertifikat hasil tangkapan ikan;
- g. pelaksanaan pengawasan pengisian bahan bakar;
- h. pelaksanaan pembangunan, pengembangan, pemeliharaan, pendayagunaan, dan pengawasan, serta pengendalian sarana dan prasarana;
- i. pelaksanaan fasilitasi penyuluhan, pengawasan dan pengendalian sumber daya ikan, perkarantinaan ikan, publikasi hasil penelitian, pemantauan wilayah pesisir, wisata bahari, pembinaan mutu, serta pengolahan, pemasaran, dan distribusi hasil perikanan;
- j. pelayanan jasa, pemanfaatan lahan, dan fasilitas usaha;
- k. pelaksanaan pengumpulan data, informasi, dan publikasi;
- l. pelaksanaan bimbingan teknis dan penerbitan sertifikat cara penanganan ikan yang baik;

- m. pelaksanaan inspeksi pengendalian mutu hasil perikanan pada kegiatan penangkapan ikan;
- n. pelaksanaan pengendalian lingkungan di pelabuhan perikanan; dan
- o. pelaksanaan urusan ketatausahaan.

Susunan organisasi Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu yang mengacu pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor : No: 5/PERMEN- KP/2024 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan terdiri atas:

a) Kepala Pelabuhan Perikanan

Tugas dan fungsi kepala pelabuhan perikanan nusantara pada dasarnya melekat pada tugas dan fungsi pelabuhan perikanan nusantara sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : PER.08/MEN/2012 tentang Kepelabuhanan Perikanan yakni Kepala pelabuhan adalah pimpinan pelabuhan perikanan yang memiliki kewenangan untuk melaksanakan fungsi pengaturan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan di pelabuhan perikanan.

b) Kepala Subbagian Umum

Kepala Subbagian Umum mempunyai tugas melakukan penyusunan, pemantauan, dan evaluasi rencana, program, dan anggaran, pelaporan, urusan keuangan, hubungan masyarakat, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, persuratan, kearsipan, dokumentasi, dan rumah tangga, serta pengelolaan barang milik negara dan perlengkapan.

c) Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Pelaksana Teknis Perikanan Tangkap sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.

Selain ketiga jabatan tersebut diatas, terdapat juga sub koordinator di setiap kelompok kerja sebagaimana berikut :

1) Sub Koordinator Tata Kelola dan Pelayanan Usaha

Sub Koordinator Tata Kelola dan Pelayanan Usaha mempunyai tugas melakukan pelaksanaan pembangunan, pengembangan, pemeliharaan, pengawasan, pengendalian, pendayagunaan sarana dan prasarana; bimbingan teknis; fasilitasi penyuluhan, pengawasan dan pengendalian sumber daya ikan, perkarantinaan, publikasi hasil penelitian, pemantauan

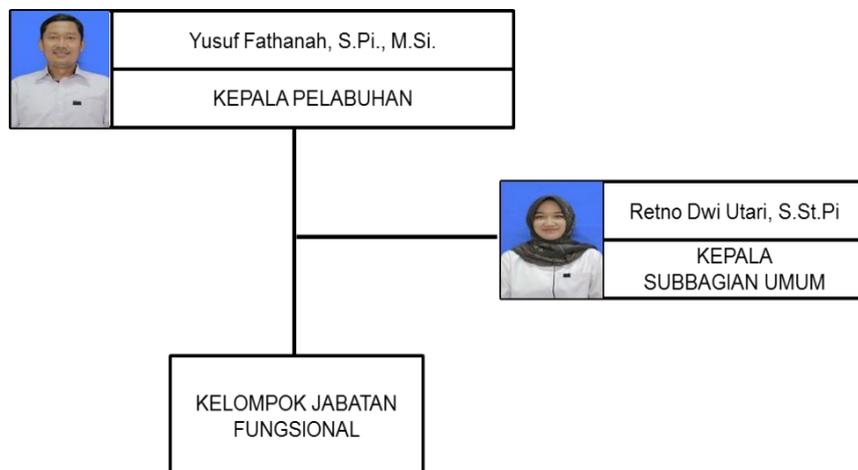
wilayah pesisir, wisata bahari, pembinaan mutu, serta pengolahan, pemasaran dan distribusi; pelayanan pemanfaatan lahan dan fasilitas usaha; pelayanan jasa, dan bimbingan teknis tata kelola dan pelayanan usaha.

2) Sub Koordinator Operasional Pelabuhan

Sub Koordinator Operasional Pelabuhan mempunyai tugas melakukan pelaksanaan pengumpulan data, informasi, publikasi, inspeksi pembongkaran ikan, bimbingan teknis, dan penerbitan Sertifikat CPIB.

3) Sub Koordinator Kesyahbandaran

Sub Koordinator Kesyahbandaran mempunyai tugas melakukan pelaksanaan pengaturan keberangkatan, kedatangan, dan keberadaan kapal perikanan, pelayanan penerbitan Surat Tanda Bukti Laporan, pemeriksaan *Log Book*, penerbitan Surat Persetujuan Berlayar, penerbitan Sertifikat Hasil Tangkapan Ikan, pengawasan pengisian bahan bakar, bimbingan teknis, serta kegiatan kesyahbandaran lainnya sesuai peraturan perundang-undangan.



Gambar 1. Struktur Organisasi PPN Palabuhanratu Tahun 2024

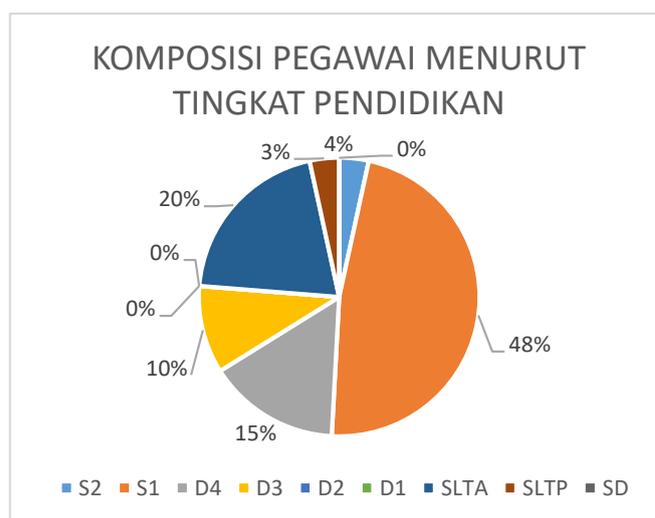
2.2. Komposisi Pegawai

Kedudukan dan peranan sumber daya manusia/aparatur adalah sangat penting, dimana Aparatur memegang peranan dalam penyelenggaraan operasional untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan pada Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu.

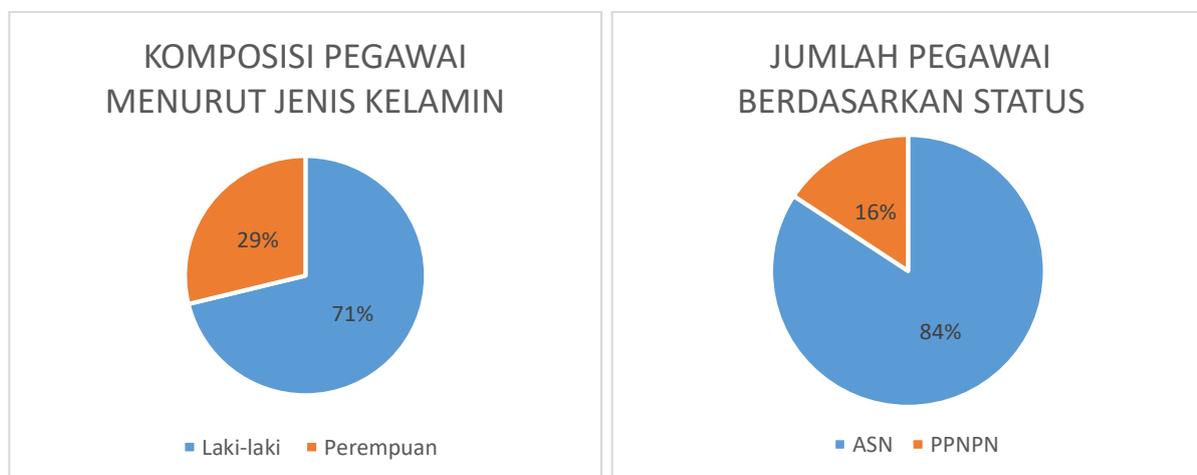
Sampai akhir bulan Desember 2024 jumlah pegawai Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu sebanyak 70 orang yang terdiri dari 59 orang ASN dan 11 orang Pegawai Pemerintah Non ASN. Secara terperinci komposisi pegawai Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu dapat dijabarkan sebagai berikut:

JENIS KELAMIN	S2	S1	D4	D3	D2	D1	SLTA	SLTP	SD	JUMLAH
Laki-laki	2	21	5	1			11	2		42
Perempuan		7	4	5			1			17
Jumlah	2	28	9	6	0	0	12	2	0	59

Tabel 1. Komposisi ASN Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu Tahun 2024



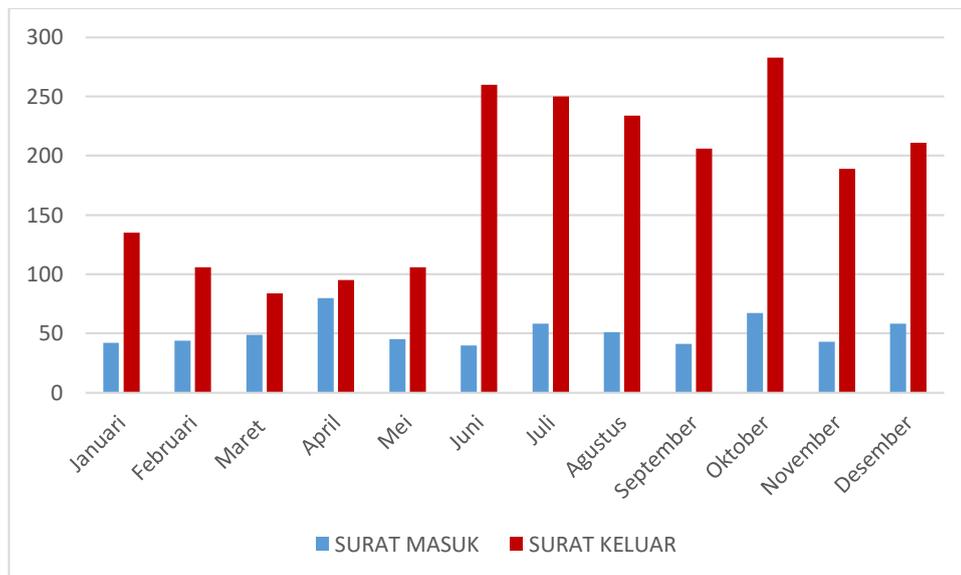
Gambar 2. Grafik Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan



Gambar 3. Grafik Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin dan Status Kepegawaian

2.3. Korespondensi

Hubungan komunikasi antar instansi dilakukan antara lain dengan kegiatan korespondensi. Semakin intens akses informasi dan komunikasi yang dilakukan antar instansi maka semakin optimal kinerja instansi/Pelabuhan Perikanan dalam melaksanakan koordinasi dengan instansi lain. Untuk mendukung operasional PPN Palabuhanratu, kegiatan korespondensi selalu dilakukan secara efektif, hal ini terlihat dari frekuensi kegiatan surat menyurat di Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu selama tahun anggaran 2024 sebagai berikut :



Gambar 4. Kegiatan Surat Menyurat di Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu Tahun 2024

Jumlah surat masuk hingga Desember 2024 sebanyak 618 surat dan jumlah surat keluar sebanyak 2.159 surat. Dari frekuensi surat masuk dan keluar tahun 2024 terlihat adanya peningkatan dibandingkan dengan frekuensi surat masuk dan keluar tahun 2023. Hal ini dapat diartikan bahwa instansi PPN Palabuhanratu semakin intens dalam mengakses informasi dan komunikasi antar instansi.

BAB III

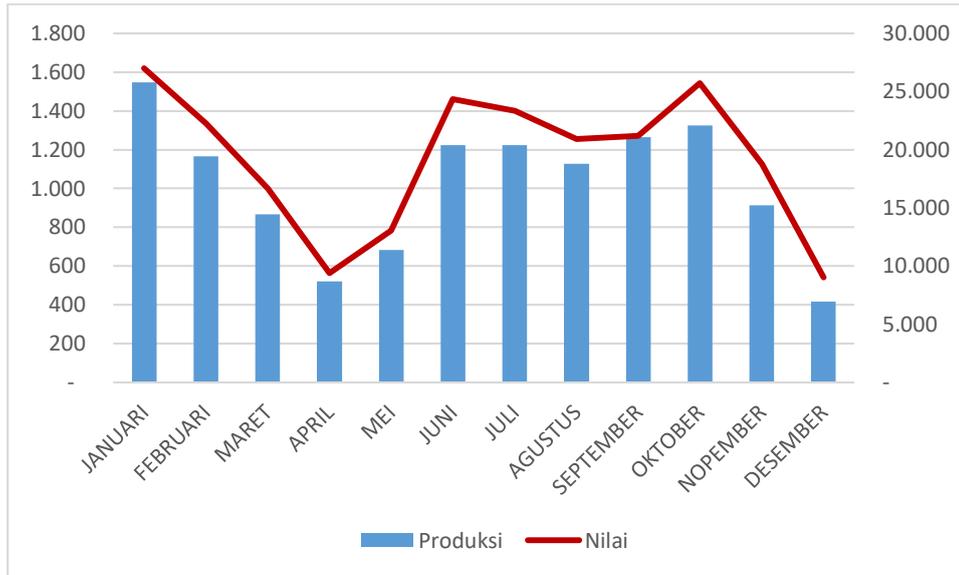
CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DAN PENGANGGARAN

Arah kebijakan pembangunan perikanan tangkap ditetapkan dalam sebuah Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 20 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2020 – 2024.

Tahun 2024, Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu telah menetapkan sasaran strategis dan indikator kinerja yang berorientasi pada hasil. Terdapat dua indikator yang memperlihatkan performa kinerja PPN Palabuhanratu, yaitu:

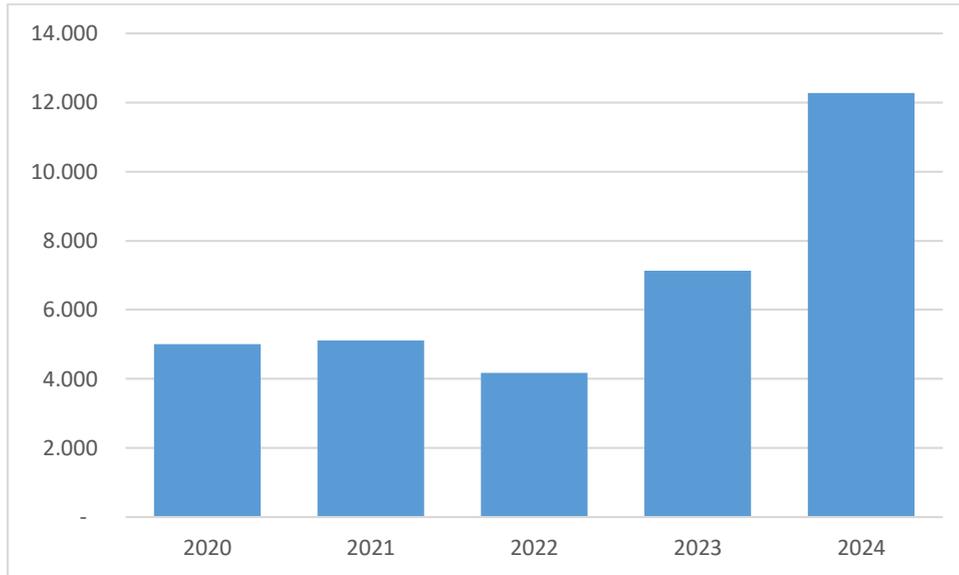
3.1. Produksi Perikanan

Produksi Perikanan Tangkap merupakan hasil perhitungan volume produksi yang didaratkan di Pelabuhan Perikanan dengan metode cacah lengkap. Realisasi produksi perikanan tangkap diukur dan dilaporkan secara berkala setiap bulan. Produksi Ikan yang didaratkan di PPN Palabuhanratu berasal dari hasil tangkapan kapal-kapal ikan domisili (Palabuhanratu) dan kapal-kapal ikan pendatang diantaranya berasal dari Cilacap, Jakarta dan Binuangeun. Adapun daerah penangkapan ikan bagi nelayan yang menggunakan *fishing baseport*-nya PPN Palabuhanratu antara lain perairan Teluk Palabuhanratu, Cisolok, Ujung Genteng, perairan sebelah Selatan Pulau Jawa dan sebelah Barat Pulau Sumatera. Komoditas Ikan hasil tangkapan yang ada didaratkan di PPN Palabuhanratu antara lain ikan Tuna, Cakalang, Tembang, Eteman, Layur, Layaran, Setuhuk, Tongkol dan Tembang.



Gambar 5. Jumlah dan nilai produksi perikanan tangkap di PPN Palabuhanratu Tahun 2024

Capaian jumlah produksi di PPN Palabuhanratu tahun 2024 yaitu 12.279 Ton atau capaian pertahun sebanyak 211.69%, capaian ini melebihi target yang ditetapkan yakni sebanyak 5.800 ton. Perbandingan jumlah volume produksi perikanan tangkap di Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu tahun 2023 dengan 2024 pada triwulan terakhir menunjukkan peningkatan sebesar 72%. Jumlah volume produksi perikanan tangkap tertinggi berada pada bulan Januari 2024 sebesar Rp. 1.549 Ton sedangkan yang terendah pada bulan April 2024 sebesar 401 Ton dalam kurun waktu 2024 mengalami fluktuatif namun meningkat signifikan. Hal ini dikarenakan meningkatnya frekuensi jumlah kapal yang melakukan pendaratan di PPN Palabuhanratu secara signifikan 7 orang dan 9 orang petugas pendataan non PNS. Ikan dominan yang ditangkap antara lain Tongkol Lisong, Cakalang, Tuna Sirip Kuning, Lemadang dan Layur.



Gambar 6. Jumlah produksi perikanan di PPN Palabuhanratu Tahun 2020 - 2024

Realisasi jumlah produksi hasil tangkapan di PPN Palabuhanratu tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar 72 % jika dibandingkan dengan tahun 2023. Kenaikan produksi tersebut disebabkan karena adanya peningkatan produksi pada kapal izin pusat sebesar 242% atau 7.449 Kg dibanding tahun 2023. peralihan musim penangkapan juga adanya migrasi kapal dari sekitar teluk palabuhanratu, seperti ujung genteng, ciselok, cidaun, garut, dan sebagainya sehingga menambah jumlah kapal yang mendaratkan ikan di PPN Palabuhanratu. Kenaikan jumlah produksi ini juga di sebabkan karena masa peralihan setelah pandemi covid yang cenderung menghambat proses bisnis penangkapan ikan yang akhirnya beranjak membaik.

3.2. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)

Indikator ini terkait dengan pengelolaan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari kegiatan pelayanan jasa pada PPN Palabuhanratu sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2015 yang terakhir diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif PNBP yang berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan Peraturan Menteri Kelautan Perikanan RI nomor 46/PERMEN-KP/2016 tentang tata cara penerimaan negara bukan pajak di lingkungan Kementerian kelautan dan perikanan di luar pungutan perikanan. Adapun Jenis pelayanan jasa yang ada di Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu meliputi: Jasa Tambat Labuh Kapal Perikanan, Jasa Pas Masuk Kendaraan, Jasa Coldstorage, Jasa Kebersihan, Pengadaan Air, Penggunaan Alat Berat, Jasa Perbengkelan, Jasa

Penggunaan Lahan dan Bangunan, Pengadaan Es, Jasa Tempat Penumpukan Barang, Jasa Pemakaian mess, Jasa pemakaian ruang rapat dan Pelayanan Listrik.

Capaian nilai Penerimaan Negara Bukan Pajak di Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu berdasarkan tabel tersebut diatas telah melebihi target yaitu sebesar 1.435.073.109 atau 193,05% dari target sebesar Rp.719.019.012,-. Hal ini dikarenakan adanya inovasi pelayanan yang memudahkan para pelaku usaha untuk membayar melalui aplikasi berbasis chatbot Whatsapp SiRatu, dimana para pengguna layanan dengan mudah membayar layanan juga menyampaikan keluhan dilapangan kepada petugas layanan sehingga dengan cepat ditindaklanjuti, juga adanya pendapatan dari penerimaan umum.

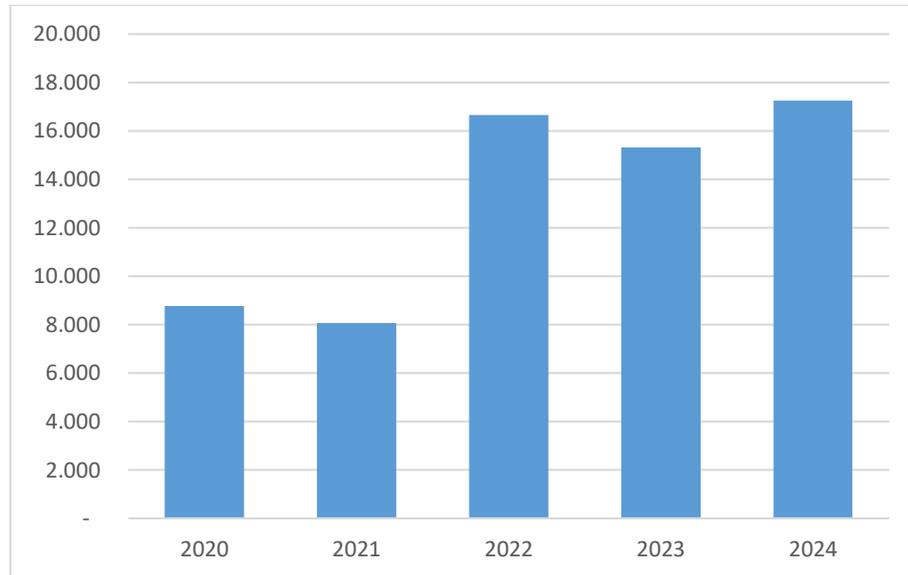
Tabel 2. Target dan Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Pada PPN Palabuhanratu Tahun 2024

No	Uraian Kegiatan	Target (Rp)	Penerimaan (Rp)
1	Jasa Tambat > 100 GT	-	21.959.560
2	Jasa Tambat Labuh 30 - 100 GT	278.531.000	151.111.185
3	Jasa Tambat Labuh 5 - 30 GT	100.000.000	191.917.364
4	Golongan I / R2 Motor	96.000.000	61.158.000
5	Golongan II R4/ Mobil	60.000.000	69.798.000
6	Golongan III R6/ Truck	10.000.000	2.270.000
7	Golongan IV R10/	1.005.000	1.360.000
8	Golongan VI / Bus	3.000.000	3.425.000
9	Berlangganan R.2	24.840.000	49.760.000
10	Berlangganan R.4	5.400.000	2.610.000
11	Berlangganan R. 6	21.600.000	19.920.000
12	Jasa Kebersihan Bangunan Permanen	2.000.000	13.933.218
13	Jasa Kebersihan Warung / Kios	40.000.000	34.890.292
14	Pengadaan air PDAM	80.000.000	157.560.227
15	Jasa Kebersihan kolam kapal > 30 GT	15.000.000	27.321.500
16	Jasa Pekerjaan Ringan	10.010.000	9.415.000
17	Jasa Pekerjaan Sedang	10.000.000	-

No	Uraian Kegiatan	Target (Rp)	Penerimaan (Rp)
18	Pelayanan Listrik	173.001.000	155.424.895
19	Jasa Pengambilan gambar	-	700.000
20	Jasa Forklif	1.000.000	-
21	Jasa Truck crane	3.600.000	9.300.000
22	Jasa Cool Room	40.000.000	26.718.871
23	Jasa Mobil Tangki air	27.075.000	49.144.800
24	ABF	5.000.000	-
25	Jasa Tangki BBM dan instalasi	13.500.000	15.845.550
26	Jasa Penggunaan Tanah	22.500.000	113.369.640
27	Jasa Forklif	1.000.000	-
28	Jasa Pemeliharaan Tanah/Prasarana	8.400.000	28.342.410
29	Jasa Bangunan semi permanen	10.750.000	3.298.720
30	Jasa Bangunan Permanen	33.105.000	53.134.783
31	Gedung pemasaran ikan	84.000.000	73.878.003
32	Tempat Pen. Brg Ruang Terbuka tidak Beratap	9.225.000	23.653.000
33	Tempat Pen. Brg Ruang Terbuka Beratap	-	675.000
34	Jasa Bangunan Permanen	33.105.000	53.134.783
35	Gedung pemasaran ikan	84.000.000	73.878.003
36	Tpt Pen. Brg Ruang Terbuka tidak Beratap	9.225.000	23.653.000
37	Tpt Pen. Brg Ruang Terbuka Beratap	-	675.000
38	Penerimaan Umum	-	63.178.091
Jumlah		-	1.435.073.109

Untuk mengoptimalkan penerimaan negara bukan pajak di PPN Palabuhanratu pada tahun 2024 maka perlu dilakukan penambahan Sumber Daya Manusia pada pelayanan jasa pas masuk dikarenakan pintu masuk pelabuhan terbagi 3 pintu dengan SDM yang ada saat ini 8 orang belum optimal, Pelayanan jasa perbengkelan khususnya tenaga ahli pada bidang perbengkelan sehingga diperlukan bimtek khusus perbengkelan, perlu penambahan petugas pelayanan Cold Storage agar dapat melakukan pelayanan secara optimal, serta perlu

mengoptimalkan sarana dan prasarana pada palang pintu pas masuk , sehingga potensi PNBP pada tahun 2023 pas masuk pelabuhan dapat meningkat serta perbaikan mesin penyediaan es dapat menjadi potensi PNBP baru yang dapat dioptimalkan.



Gambar 7. Realisasi Nilai PNBP di PPN Palabuhanratu Tahun 2020 - 2024

Realisasi nilai Penerimaan Negara Bukan Pajak di Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu dari tahun 2020 s/d 2024 mengalami peningkatan, pada tahun 2024 capaian PNBP mencapai Rp. 1.725.146.478.atau 45% dari target sebesar Rp. 1.188.542.000

3.3. Target dan Capaian Indikator Kinerja Tahun 2024

Rata - rata Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS) Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu pada tahun 2024 adalah **117,07%** atau kategori “Istimewa” dengan rincian target dan capaian indikator kerjanya sebagai berikut :

Tabel 3. Target dan Capaian Indikator Kinerja PPN Palabuhanratu Tahun 2024

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target 2024	TW I	TW II	TW III	TW IV	%
1	Nilai PNBP Sektor Perikanan Tangkap Meningkat di PPN Palabuhanratu	1 Penerimaan PNBP Non SDA di PPN Palabuhanratu (Rp.Juta)	1.188,54	486,13	920,073	1.300	1725	145.14
2	Produktivitas perikanan tangkap di PPN Palabuhanratu meningkat	2 Volume produksi perikanan tangkap di PPN Palabuhanratu (Ton)	5.800	3.570,82	5.678,5	9.396,26	12278	211.69
3	Pengelolaan PPN Palabuhanratu yang berdaya saing	3 Persentase permohonan perusahaan yang dianalisa dan/atau dievaluasi di PPN Palabuhanratu (%)	100				100	100.00
		4 Tingkat Kinerja PPN Palabuhanratu (Nilai)	84	86,08	87,67	90,41	87,83	104.56
		5 Tingkat Pelayanan Kesyahbandaran PPN Palabuhanratu (%)	32				46,88	146.50
4	Pengembangan dan peningkatan fasilitas PPN Palabuhanratu yang optimal	6 Persentase Pengendalian Pengembangan Fasilitas PPN Palabuhanratu (%)	55				80,40	146.18
		7 Nilai Pengendalian Lingkungan di PPN Palabuhanratu (Nilai)	30,10	90,65	96,86	90,49	87,79	291.65
5	Pengelolaan kapal perikanan dan alat penangkapan ikan yang berdaya saing di PPN Palabuhanratu	8 Kapal Perikanan izin daerah yang memenuhi ketentuan (Kapal)	90	56	92	162	182	202.22

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target 2024	TW I	TW II	TW III	TW IV	%
6	Pengelolaan Awak Kapal Perikanan yang Tersertifikasi/Terlindungi di PPN Palabuhanratu	9 Persentase Peningkatan Pengetahuan Kompetensi dan Perlindungan Nelayan/Awak Kapal Perikanan (%)	7				14,26	203.71
7	Tata Kelola pemerintah yang baik di lingkungan PPN Palabuhanratu	10 Nilai PM Pembangunan ZI PPN Palabuhanratu (yang telah dinilai WBK) (Nilai)	80				84,19	105.24
		11 Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja PPN Palabuhanratu (%)	80	100	100	80	100	125.00
		12 Nilai Rekonsiliasi kinerja PPN Palabuhanratu (Nilai)	94				98,71	105.01
		13 Indeks Profesionalitas ASN di PPN Palabuhanratu (Indeks)	84		86,67		90,62	107.88
		14 Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa PPN Palabuhanratu (%)	80				95,13	118.91
		15 Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN PPN Palabuhanratu (%)	80				94	117.50
		16 Nilai IKPA PPN Palabuhanratu (Nilai)	93,76		99,06		98,05	104.58
		17 Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran PPN Palabuhanratu (Nilai)	71				75	105.63
		18 Nilai Survei Kepuasan Masyarakat lingkup PPN Palabuhanratu (Indeks)	88,3	92,16	92,84	94,50	94,72	107.27

3.4. Alokasi Anggaran

Guna mendukung pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan, PPN Palabuhanratu telah diberikan alokasi anggaran dari Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, Kementerian Kelautan dan Perikanan. Hal ini untuk mengakomodir pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang telah diamanatkan oleh DJPT melalui program pengembangan dan pengelolaan perikanan tangkap.

Dalam rangka melaksanakan program pengembangan dan pengelolaan perikanan tangkap, pada tahun anggaran 2024 PPN Palabuhanratu mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 17.530.769.000,- yang dibagi menjadi 5 (lima) kegiatan utama, yaitu; 1) Pengelolaan Kapal Perikanan Alat Penangkapan Ikan dan Pengawakan Kapal Perikanan, 2) Pengelolaan Pelabuhan Perikanan, 3) Pengelolaan Perizinan dan Kenelayanan, 4) Pengelolaan Sumber Daya Ikan (SDI) dan 5) Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Perikanan Tangkap. Adapun rincian alokasi anggaran tersebut dapat dilihat pada tabel 4 dibawah ini.

Tabel 4. Rincian Alokasi Anggaran PPN Palabuhanratu Berdasarkan Kegiatan Tahun Anggaran 2024

No	Kegiatan	Total Anggaran (Rp.)
1.	Pengelolaan Kapal Perikanan Alat Penangkapan Ikan dan Pengawakan Kapal Perikanan	38.000.000
2.	Pengelolaan Pelabuhan Perikanan	2.109.853.000
3.	Pengelolaan Perizinan dan Kenelayanan	4.000.000
4.	Pengelolaan Sumber Daya Ikan (SDI)	40.208.000
5.	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Perikanan Tangkap	15.338.708.000
Jumlah Total		17.530.769.000

3.1. Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran menggambarkan antara alokasi anggaran atau Pagu Anggaran dengan realisasi belanjanya. Realisasi anggaran ini mencakup belanja pegawai, belanja barang dan belanja modal yang dikeluarkan mulai dari 01 Januari sampai dengan 31 Desember 2024.

Realisasi anggaran PPN Palabuhanratu pada tahun 2024 sebesar Rp.17.000.829.596,- atau 99,98% dari alokasi anggaran atau DIPA yang telah ditetapkan. Realisasi anggaran tersebut merupakan akumulasi dari beberapa capaian jenis belanja yaitu, belanja pegawai sebesar Rp. 8.030.530.950,- atau 99,16%, belanja barang sebesar Rp. 7.949.772.651,- atau 99,48% dan belanja modal sebesar Rp. 1.020.525.995,- atau 70,79%. Perbandingan antara realisasi anggaran terhadap pagu anggaran PPN Palabuhanratu dapat dilihat pada tabel 5 dibawah ini.

Tabel 5. Perbandingan Antara Realisasi Anggaran Terhadap Pagu Anggaran di PPN Palabuhanratu Berdasarkan Jenis Belanja Tahun Anggaran 2024

No	Uraian	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi	
			(Rp)	(%)
1	Belanja Pegawai	8.098.165.000	8.030.530.950	99,16
2	Belanja Barang	7.991.065.000	7.949.772.651	99.48
3	Belanja Modal	1.441.539.000	1.020.525.995	70,79
Total		17.530.769.000	17.000.829.596	96.98

Sedangkan alokasi anggaran yang tidak terserap atau sisa anggaran di PPN Palabuhanratu Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp **529.939.404,-** atau **3,02%** dari pagu anggaran.

BAB IV

KERAGAAN OPERASIONAL

Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu telah mengalami dua tahap pembangunan, yaitu pembangunan tahap pertama pada tahun 1991-1993 kemudian pembangunan tahap kedua selama periode tahun 2003 sampai sekarang. Pembangunan Pelabuhan Perikanan tahap pertama ditujukan untuk menunjang aktivitas perikanan terutama unit penangkapan ikan dengan ukuran kapal sampai dengan 30 GT dengan dibangunnya kolam I dan pembangunan Pelabuhan Perikanan tahap kedua untuk menunjang aktivitas kapal berukuran 30 GT sampai dengan 200 GT dengan dibangunnya kolam II.

Sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu dalam kondisi baik dan layak digunakan untuk melayani kepentingan nelayan maupun masyarakat perikanan yang menggunakan jasa pelabuhan. Adapun kegiatan yang dilaksanakan di PPN Palabuhanratu diantaranya yaitu :

4.1. Kegiatan Operasional Pelabuhan Perikanan

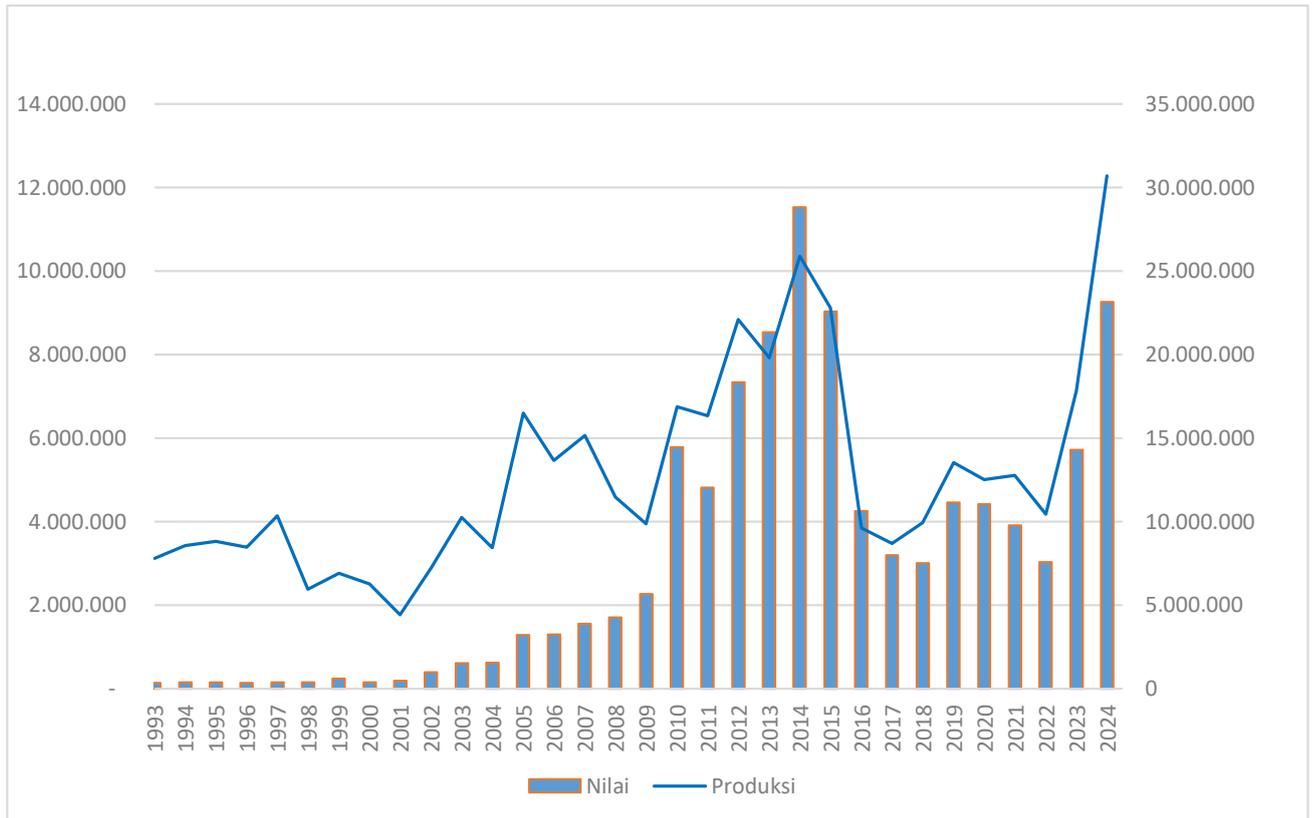
Operasional Pelabuhan Perikanan secara sederhana adalah suatu pemanfaatan fasilitas yang ada di Pelabuhan Perikanan untuk mendorong terselenggaranya kegiatan produksi dan jasa di bidang usaha perikanan seperti; Produksi Ikan, aktivitas masyarakat perikanan, pembinaan mutu hasil perikanan.

4.1.1. Produksi Ikan

Ikan yang didaratkan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu berasal dari hasil tangkapan kapal penangkap ikan yang berdomisili di Palabuhanratu dan kapal penangkap ikan pendatang yang berasal dari Cilacap dan Jakarta. Adapun daerah penangkapan ikan bagi nelayan yang berpangkalan di PPN Palabuhanratu antara lain perairan Teluk Palabuhanratu, Cisolok, Ujung Genteng, perairan sebelah Selatan Pulau Jawa dan sebelah Barat Pulau Sumatera.

Dari Gambar 8 terlihat, sejak tahun 1993 sampai tahun 2024 produksi ikan dan nilai produksi ikan yang didaratkan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu mengalami fluktuasi. Produksi ikan yang didaratkan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu pada tahun 2024 mengalami kenaikan signifikan sebesar 72% dibandingkan produksi tahun 2023 dengan persentase

nilai mencapai 89% dengan rata-rata produksi ikan perbulan sebesar 1.023 ton dan rata-rata nilai produksi perbulan sebesar Rp.11.917.507. Jumlah produksi ikan yang didaratkan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu pada tahun 2024 sebesar 12.277 ton dengan rata-rata produksi pertahun dari tahun 1993 s.d. 2023 sebesar 5.123 ton, dan nilai produksi ikan sebesar Rp. 231.659.416.433 dengan nilai produksi rata- rata sebesar Rp. 77.729.664.568,- per tahun.

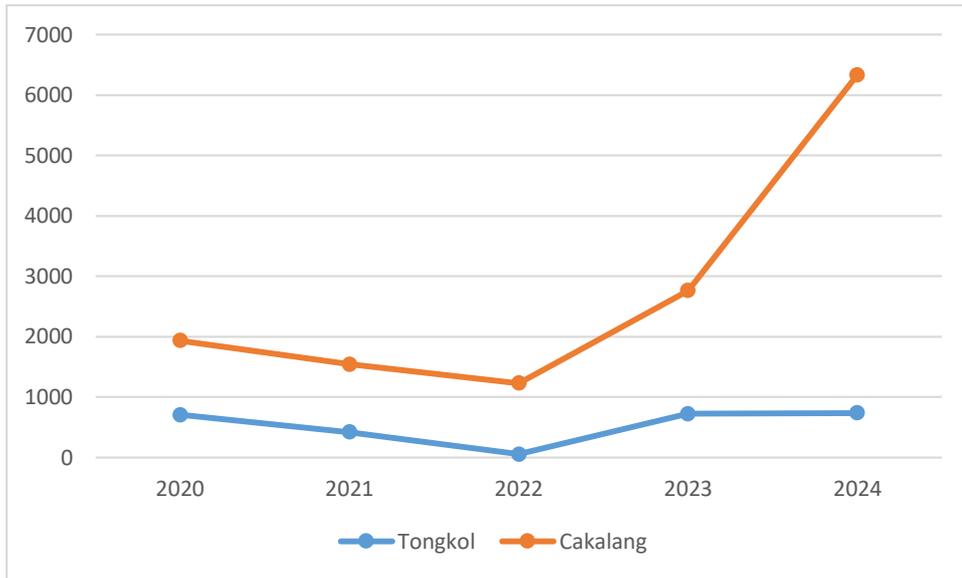


Gambar 8. Volume dan nilai produksi Ikan di PPN Palabuhanratu Tahun 1993–2024

Secara spesifik jenis ikan yang didaratkan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu tahun 2024 didominasi oleh jenis ikan Tuna, Cumi, Setuhuk, Cakalang, Tongkol, Layur, dan Layang. Produksi ikan dominan yang didaratkan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu tersebut sejak tahun 1993 hingga tahun 2024 selalu mengalami fluktuasi.

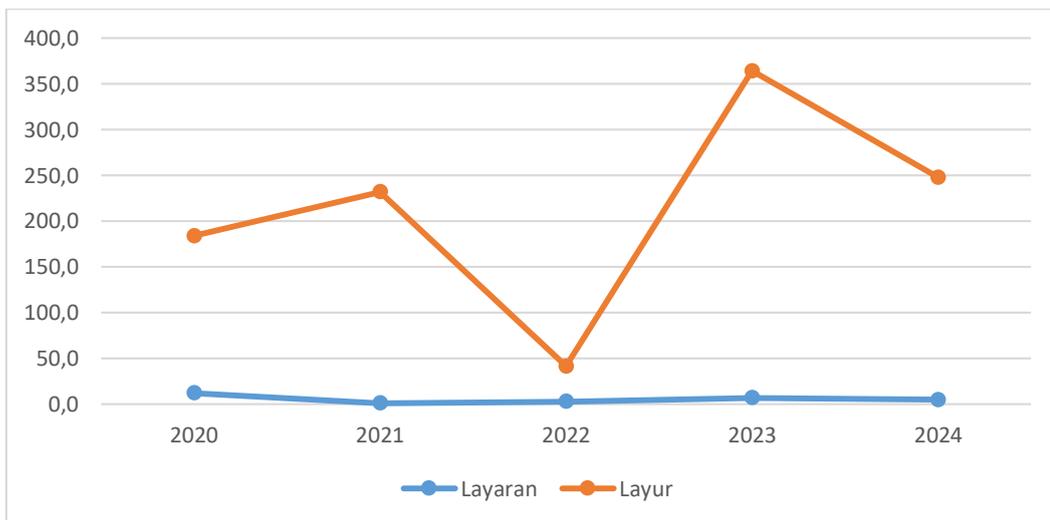
Produksi ikan Cakalang dan Tongkol pada tahun 2024 mengalami peningkatan signifikan, produksi ikan Cakalang meningkat sebesar 3.570 Ton (175%) dibandingkan pada tahun sebelumnya, diikuti dengan meningkatnya nilai produksi sebesar 172% yang dikarenakan berubahnya harga produsen dan konsumen. Kemudian untuk produksi ikan Tongkol mengalami peningkatan sebesar 12 Ton (2%) dari tahun sebelumnya, dengan nilai produksi meningkat 5%.

Produksi ikan Cakalang dan Tongkol disajikan dalam gambar berikut:



Gambar 9. Volume Produksi Ikan Cakalang dan Tongkol di PPN Palabuhanratu Tahun 2020 – 2024

Produksi ikan Layaran juga mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar 30 % begitu pula dengan nilai produksi turun sebesar 33% jika dibandingkan dengan tahun 2023. Kemudian untuk produksi ikan layur pada tahun 2023 mengalami penurunan yang signifikan sebesar 32% dibandingkan tahun 2023 dan nilai produksinya menurun sebesar 15% namun tidak berpengaruh signifikan terhadap produktivitas secara keseluruhan.



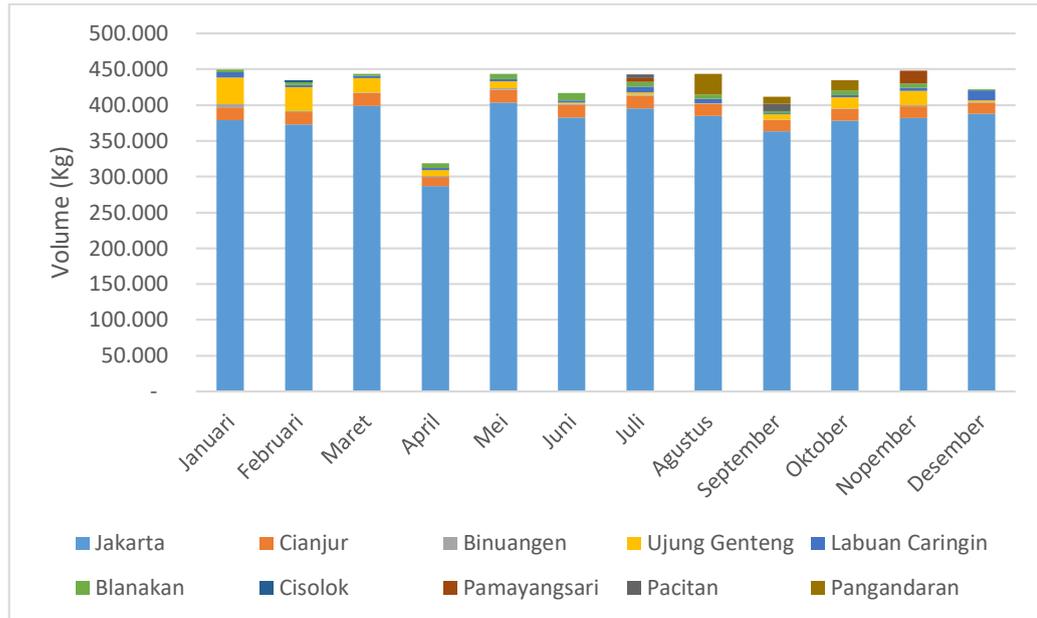
Gambar 10. Volume Produksi Ikan Layaran dan Layur Di PPN Palabuhanratu Tahun 2020 – 2024

Produksi jenis ikan Tuna dan Tembang mengalami fluktuasi seperti yang tercantum pada Gambar 11. Volume produksi ikan Tuna mengalami kenaikan pada tahun 2024 sebesar 785 ton (46%) dibandingkan tahun 2023 sedangkan nilai produksinya sebesar 65%. Produksi jenis ikan Tembang yang didaratkan di PPN Palabuhanratu pada tahun 2024 mengalami peningkatan yang signifikan sebesar 62% dengan nilai produksinya sebesar 60%.



Gambar 11. Volume Produksi Ikan Tuna dan Tembang Di PPN Palabuhanratu Tahun 2020 - 2024

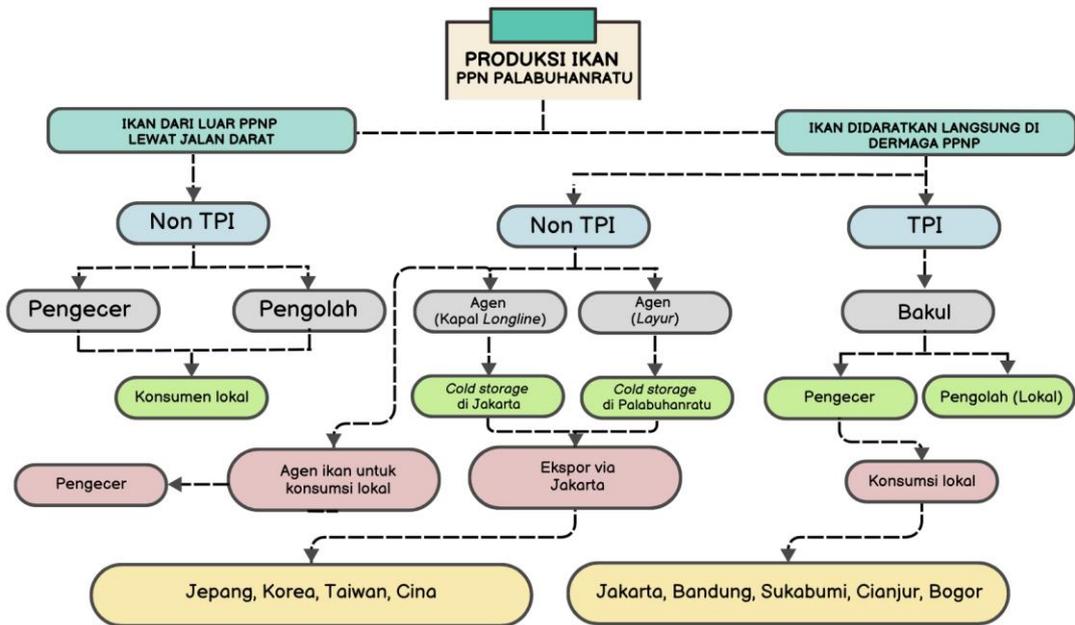
Volume produksi Ikan di PPN Palabuhanratu, selain hasil tangkapan kapal-kapal perikanan yang mendarat di kolam pelabuhan, juga berasal dari beberapa tempat pendaratan ikan di sekitar PPN Palabuhanratu sebagai kawasan pendukung dan daerah lain yang diangkut melalui jalan darat seperti PPI Ciwaru, PPI Ujung Genteng, Cianjur dan daerah lainnya seperti Binuangeun dan Jakarta. Jenis ikan yang didistribusikan dari Palabuhanratu antara lain ikan Cakalang, Tembang, Etaman, Layur, Layaran, Setuhuk, Tongkol dan Tembang. Sebagaimana tersaji pada Gambar 12.



Gambar 12. Volume Produksi Ikan Lewat Darat ke PPN Palabuhanratu Tahun 2024

Dari Gambar diatas, terlihat bahwa jumlah ikan yang berasal dari luar daerah Palabuhanratu (melalui jalan darat) pada tahun 2024 sebesar 5.015.587 Kg dengan nilai produksi sebesar Rp. 132.823.545.000,- dan rata-rata produksi per bulan sebesar 418.000 kg. Adapun daerah yang memberikan kontribusi terbesar bagi kebutuhan ikan di Palabuhanratu adalah Jakarta sebesar 4.515.625 Kg (89,9%), Cianjur sebesar 199.025 Kg (4,0%), Ujung genteng sebesar 158.985 Kg (3,2%). Dengan nilai produksi paling besar yaitudari Jakarta (87,4%), dengan kontribusi tambahan cukup berarti dari Ujung Genteng (5,2%) dan Cianjur (2,5%). Adapun tren bulanan pada tahun 2024 Produksi rata-rata per bulan: 418.000 Kg dengan nilai rata-rata per bulan sebsar Rp 11,07 Miliar. Untuk bulan dengan produksi tertinggi ada pada bulan November sebesar 447.721 Kg atau Rp 11,90 Miliar. Bulan dengan produksi terendah pasokan ada pada bulan April sebesar 318.564 Kg atau nilai Rp 8,14 Miliar. Produksi pasokan cenderung stabil di kisaran 400 ribu Kg/bulan, dengan puncak produksi pasokan di akhir tahun (November–Desember). Jakarta merupakan daerah yang memberikan kontribusi besar, karena jenis ikan yang didaratkan Pantai Utara Jawa saling melengkapi dengan jenis ikan yang dihasilkan di Palabuhanratu (Pantai Selatan Jawa). Sehingga pada kondisi/musim tertentu saling membutuhkan, dimana ada terdapat jenis ikan di Pantai Utara Jawa yang kurang sedangkan di Pantai Selatan Jawa sedang musim. Sehingga terjadilah arus distribusi pemasaran ikan dari Palabuhanratu ke daerah Jakarta dan sebaliknya. Produksi Ikan yang didaratkan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu dipasarkan dalam bentuk segar, maupun berbentuk

olahan (ikan asin, ikan pindang, maupun jenis olahan lainnya), namun pada tahun 2024 jenis ikan pindang maupun jenis olahan lainnya hanya diolah dalam skala mikro kecil/ industri rumahan. Sejak beberapa tahun kebelakang, distribusi pemasaran ikan dalam bentuk segar di pasok sebagian besar oleh kapal longline dan langsung di distribusikan ke luar daerah khususnya Jakarta, hanya sebagian kecil untuk konsumsi di Palabuhanratu

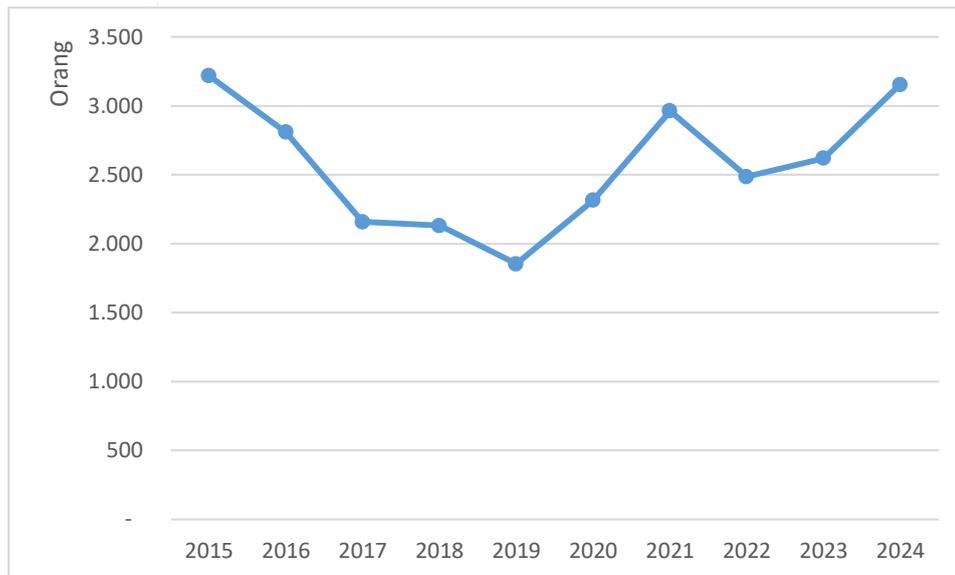


Gambar 13. Pola Pemasaran Ikan di PPN Palabuhanratu

4.1.2 Masyarakat Perikanan

Masyarakat perikanan yang melakukan kegiatan usaha di lingkungan PPN Palabuhanratu diantaranya adalah nelayan penangkap ikan, pemilik kapal, pengurus kapal, tenaga bongkar muat, bakul dan lainnya. Adapun jumlah nelayan yang melakukan aktivitas penangkapan yang menggunakan PPN Palabuhanratu sebagai pelabuhan pangkalan sejak operasional sampai dengan tahun 2024.

Dari gambar dapat diuraikan bahwa selama ini jumlah nelayan yang melakukan aktivitas penangkapan dengan PPN Palabuhanratu sebagai pelabuhan pangkalan pada tahun 2024 mengalami peningkatan dibanding tahun 2023 yaitu sebesar 20 % dengan jumlah nelayan sebanyak 3.154 orang



Gambar 14. Jumlah Nelayan di PPN Palabuhanratu Tahun 2015 - 2024

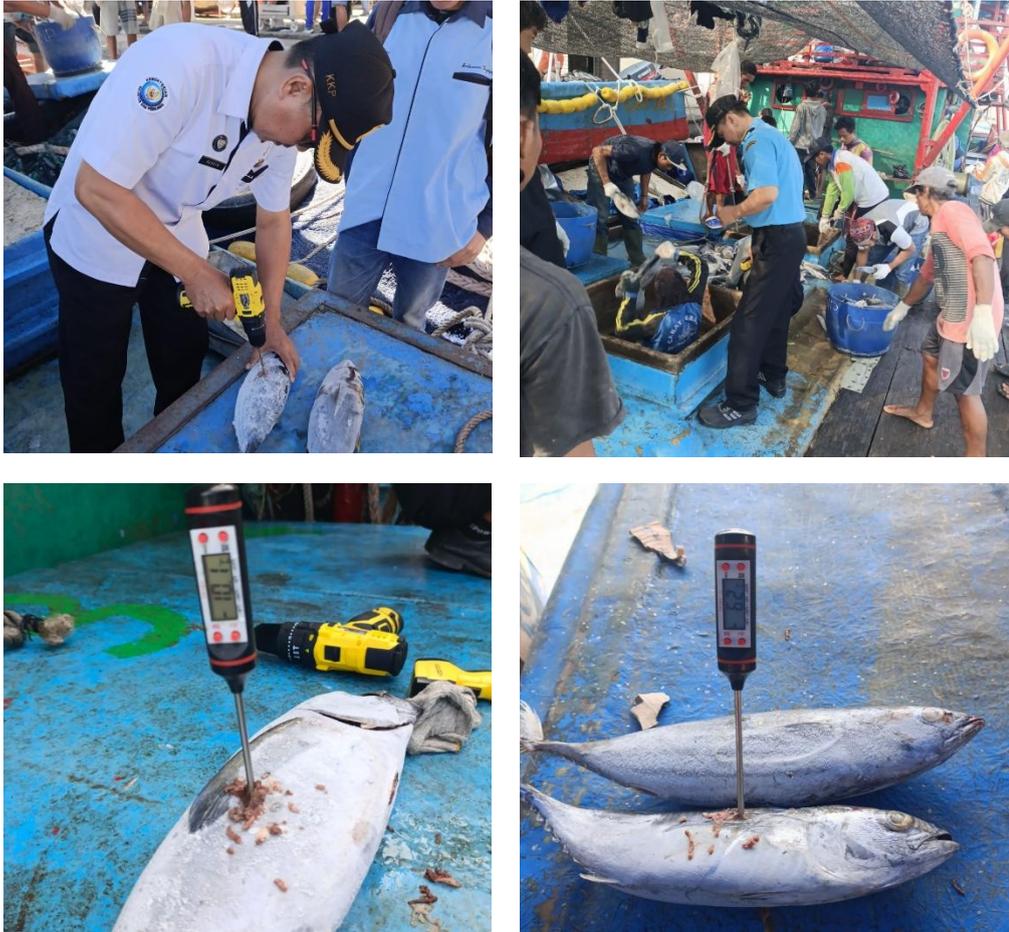
4.1.3 Pembinaan Mutu Hasil Perikanan

Pembinaan mutu hasil perikanan yang dilakukan diantaranya melaukan inspeksi pembongkaran ikan dan pengujian mutu ikan di Laboratorium PPN Palabuhanratu. Kegiatan pengujian mutu ikan di laboratorium diantaranya adalah melakukan uji formalin dan uji histamin pada ikan segar maupun olahan, Selain itu, dilakukan Monitoring Sanitasi Hygiene TPI dan Sentra Pasar Ikan secara bekala (setiap bulan)

a) Inspeksi Pembongkaran Ikan

Kegiatan Inspeksi pembongkaran ikan yang dilakukan di PPN Palabuhanratu meliputi :

1. Pengecekan Suhu Ikan;
2. Pendataan Produksi Ikan berdasarkan Mutu; dan
3. Pengambilan Dokumentasi Inspeksi Pembongkaran Ikan.



Gambar 15. Inspeksi Pembongkaran Ikan Tahun 2024

Dari hasil inspeksi pembongkaran kapal penangkap & pengangkut ikan yang didaratkan di PPN Palabuhanratu dapat disimpulkan bahwa secara umum penanganan terhadap ikan telah dilakukan dengan cukup baik dapat dilihat dari pengujian organoleptik pada ikan yang didaratkan rata-rata berkisar pada nilai 7 sampai 8 serta suhu ikan selalu dipertahankan dibawah 5° C hal itu cukup menunjukkan bahwa ikan yang didaratkan dalam kualitas Mutu I (kualitas sangat baik) dan kualitas Mutu II (Kualitas baik).

a) Pengujian Mutu Ikan di Laboratorium

Adanya Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah serta Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan yang menetapkan tentang persyaratan dalam penanganan ikan di produksi perikanan tangkap, perikanan budidaya, produksi kapal penangkap dan pengangkut ikan, tempat pendaratan ikan, tempat pelelangan ikan, unit pengolah ikan, sarana distribusi hasil perikanan dan lain-lain yang terkait dengan jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan maka perlu diadakan pengujian mutu terhadap hasil perikanan.

Salah satu kegiatan pembinaan mutu hasil perikanan di sekitar wilayah PPN Palabuhanratu diantaranya adalah kegiatan pengujian dengan parameter pengujian kimia diantaranya pengujian formalin, boraks, dan histamin. Disamping pengujian diatas kami juga melaksanakan monitoring bahan tambahan yang berbahaya bagi produk olahan diantaranya adalah Pengujian Boraks, Rhodamin B, dan Hidrogen Peroksida.



Gambar 16. Pengujian Mutu Ikan di Laboratorium

Berdasarkan pengujian formalin yang dilakukan oleh Tim Bina Mutu PPN Palabuhanratu terhadap ikan segar dan ikan olahan di wilayah Palabuhanratu selama tahun 2024 untuk sampel ikan segar sebanyak 102 sampel, ikan asin 60 dan ikan olahan sebanyak 60 sampel. Semua sampel ini negatif mengandung formalin dan histamin kecuali histamin yang ada pada ikan tongkol dan cakalang dibawah 25 ppm. Pengambilan sampel dilakukan secara acak yang diambil dari tempat pelelangan ikan, *fish market*, penjual ikan di pasar tradisional, maupun penjual ikan di dermaga 2.

b) Monitoring Sanitasi Hygiene TPI dan Sentra Pasar Ikan

Pelabuhan Perikanan menyediakan Fasilitas Gedung TPI dan Sentra Pasar ikan yang dapat digunakan nelayan/masyarakat perikanan dalam kegiatan Pelelangan ikan dan transaksi jual beli ikan sehingga diharapkan dengan adanya TPI dan Sentra pasar ikan dapat menjamin mutu hasil tangkapan.

Disisi lain dengan adanya TPI dan Sentra Pasar ikan yang tersedia, pihak pelabuhan perikanan menugaskan kepada petugas mutu untuk dapat melakukan pengawasan terhadap sanitasi dan hygiene agar proses penanganan ikan dapat memenuhi standar yang telah ditetapkan dan layak untuk dikonsumsi oleh masyarakat.

Demi menjaga kualitas dan mutu ikan segar yang dijual maka perlu terus dilakukan kegiatan monitoring dan evaluasi terhadap sarana dan prasarana yang terdapat di Gedung TPI dan Sentra Pasar Ikan PPN Palabuhanratu terutama tingkat sanitasi hygiene yang telah diterapkan. Karena sanitasi hygiene gedung dan peralatan akan mempengaruhi terhadap kualitas dan mutu produk ikan yang dijual di Gedung TPI PPN Palabuhanratu.

Gambar 17. Monitoring sanitasi *hygiene* TPI dan Sentra Pemasaran Ikan



Hasil dari monitoring tersebut yaitu seperti yang telah diketahui, bahwa penerapan *Good Handling Practices* di Pelabuhan tidak hanya mencakup penerapan penanganan ikan yang baik di atas kapal saja. Penanganan ikan selama proses pendaratan di TPI juga perlu diperhatikan dengan baik. Adapun yang menjadi permasalahan utama yang menghambat penerapan GHP di TPI salah satunya adalah permasalahan fisik dan bangunan TPI yang masih belum sesuai dengan standar yang seharusnya diterapkan, diantaranya adalah :

1. Penanganan sampah, limbah & peralatan tidak baik, di lokasi TPI masih banyak sampah berserakan.
2. Penerangan tidak cukup, lampu tanpa pelindung.
3. Pasokan air tidak cukup, air kolam digunakan untuk mencuci ikan tanpa melalui treatment terlebih dahulu.
4. Tidak dapat mencegah masuknya binatang ke area TPI.
5. Limbah cair dan padat tidak ditangani dengan baik (disaluran TPI masih banyak terdapat isi perut ikan).
6. Toilet berada di dalam TPI.
7. Penempatan peralatan dan wadah tidak menjamin sanitasi.
8. Peralatan yang kontak langsung dengan produk tidak dicuci dan disanitasi sebelum dan sesudah digunakan.
9. Area pembongkaran kurang dipelihara kebersihannya.
10. Banyak aktifitas lain selain pelelangan di area TPI, seperti kendaraan roda 2 dan pedagang kaki lima.
11. Tidak ada program sanitasi yang efektif di pelabuhan/TPI, belum ada dokumen prosedur SSOP.

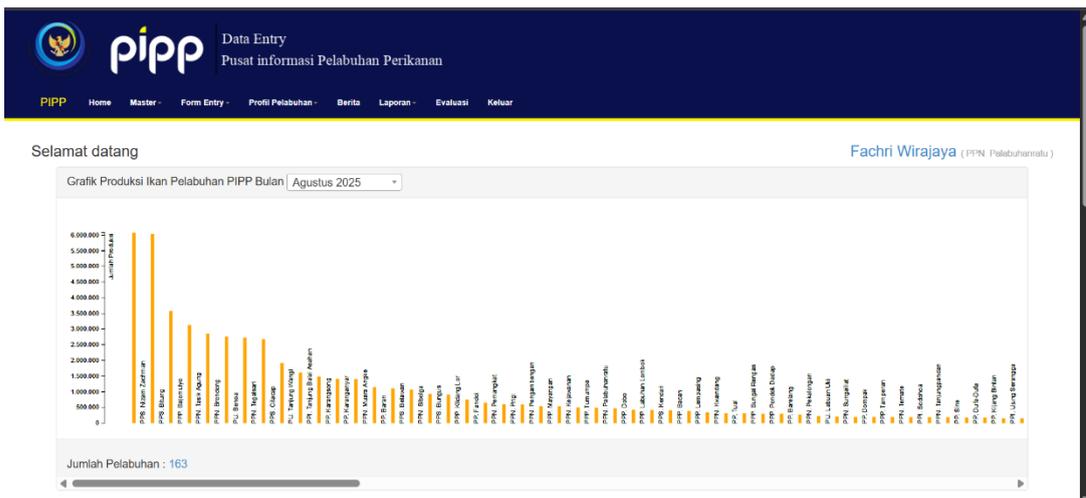
4.1.4 Pelaksanaan Sistem Informasi Pelabuhan Perikanan

Pelaksanaan sistem informasi Pelabuhan Perikanan bertujuan untuk memberikan informasi yang lebih luas dan lebih baik tentang ruang lingkup sistem perikanan tangkap khususnya kepelabuhan perikanan. Oleh sebab itu Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu berusaha untuk dapat memberikan informasi tentang kapasitas sarana dan prasarana dalam melayani keperluan operasi penangkapan ikan, data produksi perikanan, profil pelabuhan, kegiatan yang *up to date* kepada masyarakat dan pelaku ekonomi perikanan.

Data yang di *entry* meliputi data harian, bulanan dan situasional. Data harian meliputi operasional kapal masuk pelabuhan, produksi ikan, distribusi ikan

dari luar pelabuhan, harga ikan di tingkat pedagang dan, operasional kapal keluar pelabuhan, distribusi ikan yang didaratkan di pelabuhan, operasional perbekalan dari dalam dan luar pelabuhan, usaha pengolahan ikan dan masyarakat perikanan. data bulanan meliputi jasa dan pendapatan pelabuhan, serta kondisi fasilitas pelabuhan. data situasional meliputi industri di pelabuhan, registrasi kapal penangkap ikan, registrasi sumber daya ikan, registrasi alat penangkap ikan, sampling panjang ikan, data umum pelabuhan, fasilitas pokok pelabuhan, fasilitas fungsional pelabuhan, fasilitas penunjang pelabuhan, data lingkungan fisik, kelembagaan upt pelabuhan, dan kelembagaan di dalam pelabuhan

Selama tahun 2024, kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Pelabuhanratu secara nasional dengan menggunakan sistem aplikasi PIPP mendapatkan skor/nilai rata – 90,52 dengan kategori penilaian sangat baik. Nilai ini melebihi target tahunan yang ditetapkan dari target yang telah ditetapkan yaitu 84, hal ini disebabkan karena SDM sudah memadai dalam melakukan entry data PIPP. Selain itu juga, jika dibandingkan dengan tahun lalu, nilai rata-rata yang didapat pada tahun ini mengalami peningkatan sebanyak 3,72%. Hal ini disebabkan oleh karena sudah dibentuk tim khusus PIPP disetiap sub koordinator sehingga masing-masing sub koordinator mempunyai tanggung jawab untuk memasukkan datanya sendiri dan tidak hanya bergantung pada satu atau dua orang petugas PIPP untuk memasukkan data. Selain itu, terdapat perbaikan akses jaringan internet di Tahun 2024 yang memudahkan petugas dalam pengentryan data PIPP.



Gambar 18. Tampilan PIPP pada laman pipp.kkp.go.id

4.2 Kesyahbandaran di Pelabuhan Perikanan

Kewenangan Syahbandar perikanan telah diatur sebagaimana pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 03 Tahun 2013 tentang Kesyahbandaran dalam pasal 5 yang menjelaskan bahwa syahbandar di Pelabuhan Perikanan mempunyai tugas dan wewenang, sebagai berikut :

- a) Mengatur kedatangan kapal perikanan;
- b) Memeriksa ulang kelengkapan dokumen kapal perikanan;
- c) Menerbitkan Surat tanda Bukti Laporan Kedatangan Kapal Perikanan;
- d) Mengatur keberangkatan kapal perikanan;
- e) Menerbitkan Surat Persetujuan Berlayar;
- f) Menerbitkan Surat Tanda Bukti Laporan Keberangkatan Kapal Perikanan;
- g) Memeriksa teknis dan nautis kapal perikanan dan memeriksa alat penangkapan ikan, dan alat bantu penangkapan ikan;
- h) Memeriksa dan mengesahkan perjanjian kerja laut;
- i) Memeriksa *logbook* penangkapan ikan;
- j) Mengatur olah gerak dan lalu lintas kapal perikanan di pelabuhan perikanan;
- k) Mengawasi pemanduan;
- l) Mengawasi pengisian bahan bakar;
- m) Mengawasi kegiatan pembangunan fasilitas pelabuhan perikanan;
- n) Melaksanakan bantuan pencarian dan penyelamatan;
- o) memimpin penanggulangan pencemaran dan pemadaman kebakaran di pelabuhan perikanan;
- p) Mengawasi pelaksanaan perlindungan lingkungan maritim;
- q) Memeriksa pemenuhan persyaratan pengawakan kapal perikanan;
- r) Memeriksa sertifikat ikan hasil tangkapan

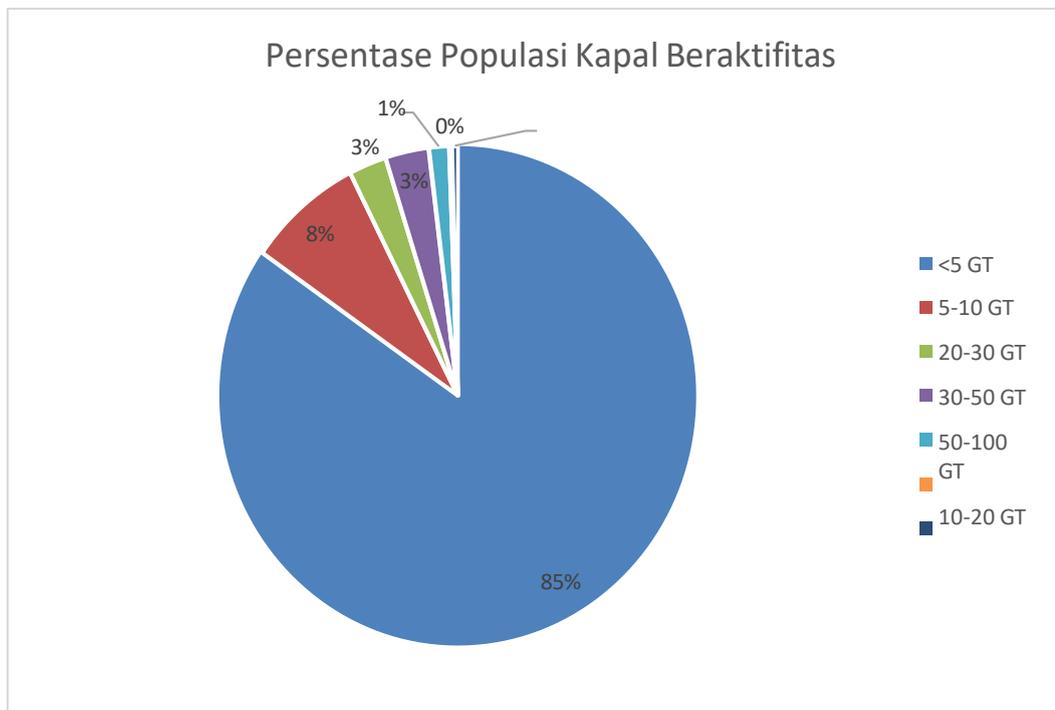
Dalam menjalankan tugas dan wewenang kesyahbandaran juga diperlukan koordinasi dan komunikasi dengan instansi terkait seperti PSDKP, Dinas Kelautan dan Perikanan baik kabupaten maupun provinsi, Kepolisian, TNI AL, dan Syahbandar perhubungan. Hal itu penting perlu dilakukan untuk menjaga stabilitas dan kondusifitas kegiatan di dalam pelabuhan perikanan.

4.2.1 Perkembangan Kapal Perikanan

Pada tahun 2024 jumlah kapal yang ada di PPN Palabuhanratu dan melakukan aktivitas sebanyak 506 kapal. Aktifitas kapal-kapal di PPN Palabuhanratu sangat di pengaruhi oleh antara lain : musim penangkapan, biaya operasional, kelengkapan dokumen kapal serta kelaikan kapal dalam melakukan operasi penangkapan. Pada Tabel 3 juga di jelaskan pada Tahun 2024 jumlah kapal yang berpangkalan di PPN Palabuhanratu didominasi oleh kapal yang berukuran < 5 GT sebanyak 313 kapal dan kapal berukuran 5-10 GT sebanyak 99 kapal. Hal ini menggambarkan kapal-kapal di PPN Palabuhanratu didominasi oleh nelayan kecil. Walau begitu, dibandingkan pada tahun 202, terdapat peningkatan signifikan terhadap jumlah kapal dengan ukuran >30 GT. Hal ini disebabkan dikarenakan adanya kapal Pasca Produksi yang memilik pelabuhan pangkalan di PPN Palabuhanratu dan Pelabuhan Perikanan Lainnya mulai mendaratkan ikannya di PPN Palabuhanratu.

Tabel 6. Jumlah Kapal Berpangkalan di PPN Palabuhanratu Tahun 2024

No	Ukuran Kapal (GT)	Jumlah
1	<5 GT	431
2	5-10 GT	40
3	20-30 GT	34
4	30-50 GT	49
5	50-100 GT	4
6	10-20 GT	4
7	>100 GT	3
Total		506



Gambar 19. Persentase Kapal Beraktifitas di PPN Palabuhanratu

Kegiatan penertiban dan penataan kapal perikanan merupakan salah satu kegiatan rutinitas kesyahbandaran perikanan yang dilaksanakan pada tahun 2024. Penertiban dan penataan kapal di kolam dermaga dilaksanakan karena banyaknya kapal – kapal dibawah 6 GT yang ada di PPN palabuhanratu yang sandar tidak pada tempatnya, selain itu kapal – kapal yang rusak dan tidak terurus yang ditinggalkan oleh pemiliknya sehingga membuat kolam pelabuhan menjadi penuh dan padat yang bisa mengganggu aktivitas olah gerak kapal – kapal diatas 10 GT. Penertiban dan penataan kapal selain untuk menjaga kerapian dan keamanan kapal dikolam juga untuk menghindari terjadinya konflik antara nelayan dalam rangka menciptakan kondisi yang kondusif dalam melakukan aktivitas di kolam dermaga.

Penertiban dan pendataan kapal juga bertujuan mendata dan mengidentifikasi alat tangkap yang digunakan oleh kapal tersebut. Tahun 2024 jumlah kapal berdasarkan alat tangkap yang digunakan dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

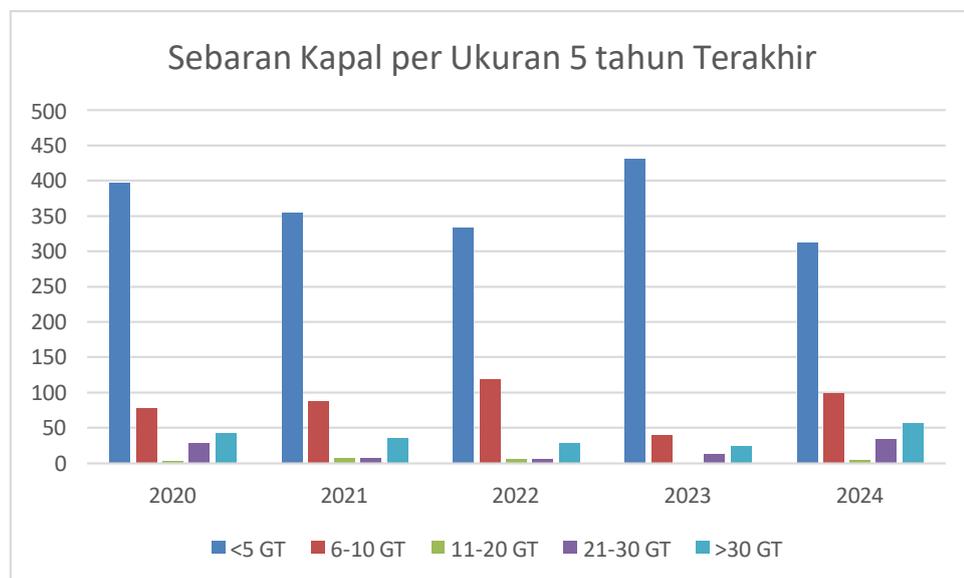
No	API	Jumlah
1	Bagan	41
2	Gillnet	17
3	Jaring Klitik	15
4	Jaring Rampus	47
5	Pancing Tonda	10
6	Pancing Ulur	244
7	Pancing Ulur Tuna	75
8	Payang	41
9	Pukat Cincin Pelagis Kecil	1
10	Pursine	2
11	Rawai Tuna	13

Tabel 7. Jumlah kapal berdasarkan API

Dari kegiatan penertiban dan penataan kapal kita juga dapat mengetahui perbandingan jumlah kapal yang beraktifitas di PPN palabuhanratu setiap tahun. Perubahan jumlah data kapal setiap tahun bisa termonitor sehingga penyebab dari turun naiknya jumlah kapal dalam setahun bisa diketahui. Berikut adalah jumlah data kapal per tahun PPN Palabuhanratu.

No	Tahun	Jenis Kapal (Unit)					Jumlah (Unit)
		Motor	Kapal Motor				
		Tempel	< 10 GT	11 - 20 GT	21 - 30 GT	> 30 GT	
1	2011	461	177	6	63	88	795
2	2012	481	223	8	151	46	908
3	2103	572	215	8	145	51	991
4	2014	469	176	6	119	24	794
5	2015	237	257	4	63	42	603
6	2016	333	139	2	44	42	560
7	2017	348	134	2	5	22	511
8	2018	346	117	14	18	7	502
9	2019	373	78	4	4	21	480
10	2020	397	79	3	28	43	550
11	2021	355	88	7	8	36	494
12	2022	333	119	6	6	28	490
13	2023	431	40	1	13	24	509
14	2024	313	99	4	34	56	506

Tabel 8. Jumlah kapal PPN Palabuhanratu per tahun



Gambar 20. Jumlah Kapal Per Tahun PPN Palabuhanratu

Setiap tahun jumlah kapal yang berpangkalan di PPN Palabuhanratu mengalami fluktuasi. Pada tahun 2024 jumlah kapal yang berpangkalan di PPN palabuhanratu mengalami penurunan dari tahun sebelumnya, hal itu disebabkan karena adanya kapal yang berpindah pangkalan sesuai dengan ijin SIPI/SIKPI. Namun pada tahun 2024 ini terdapat peningkatan yang cukup signifikan terhadap kapal dengan ukuran 30 GT keatas.

4.2.2 Penerbitan Surat Persetujuan Berlayara (SPB)

Surat Persetujuan Berlayar atau yang sering disebut SPB adalah dokumen negara yang dikeluarkan oleh Syahbandar di pelabuhan perikanan kepada setiap kapal perikanan yang akan berlayar meninggalkan pelabuhan perikanan setelah kapal perikanan memenuhi persyaratan kelaiklautan kapal, laik tangkap, dan laik simpan. SPB adalah syarat wajib yang harus dipenuhi oleh setiap kapal perikanan ketika berangkat berlayar. Adapun persyaratan dalam penerbitan SPB berdasar Permen KP Nomor 03 Tahun 2013 adalah sebagai berikut :

1. Surat permohonan penerbitan SPB;
2. Surat pernyataan kesiapan kapal berikanan berangkat dari nakhoda (*Master Sailing Declaration*);
3. Bukti Pemenuhan kewajiban kapal perikanan;
4. Dokumen Kapal dan perijinan yang masih berlaku;
5. Faktur pajak BBM untuk Non Subsidi;
6. Surat laik Operasional (SLO);
7. Surat Tanda Bukti Lapor Kedatangan (STBL Kedatangan);
8. Daftar/Crew List Anak Buah Kapal (ABK);

Persyaratan tersebut harus dipenuhi oleh setiap kapal yang ingin mengajukan SPB. Petugas syahbandar setelah menerima berkas dokumen melakukan pemeriksaan baik secara administrasi maupun secara teknis dan nautis. Pemeriksaan dilakukan guna mengetahui kesesuaian dokumen kapal yang dipersyaratkan, sehingga dokumen kapal bisa dinyatakan sah dan memenuhi syarat untuk berlayar. Apabila masih ada kekurangan maka akan dikembalikan kepada nakhoda untuk dilengkapi lagi. Penerbitan SPB PPN Palabuhanratu dilaksanakan sesuai SOP yang berlaku dan sudah standar ISO 9001. Berikut adalah alur proses penerbitan SPB

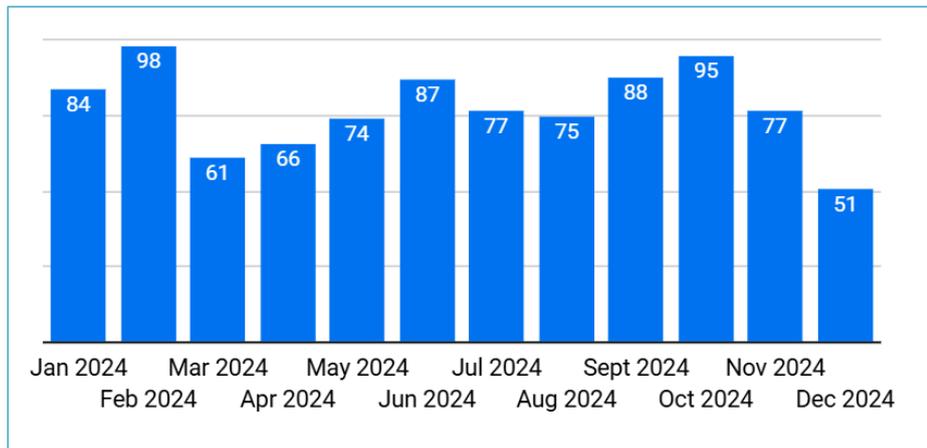
No.	Uraian Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku		
		Nakhoda	Analisis Kesyahbandaran	Syahbandar Pelabuhan Perikanan	Kelengkapan	Waktu	Output
1	Mengajukan permohonan, mengisi lembar permohonan penerbitan SPB				Berkas permohonan	5 Menit	Lembar Permohonan Surat Persetujuan Berlayar
2	Menerima dokumen kapal, memeriksa penyelesaian administrasi, jika persyaratan lengkap akan dilakukan penginputan dan pendokumentasian data permohonan penerbitan serta pemeriksaan ulang kelaikan kapal (laik laut, laik tangkap, laik simpan dan pemeriksaan ABK) di atas kapal perikanan (jika Ya, memberi paraf daftar awak kapal serta lembar Surat Persetujuan Berlayar. Jika dokumen Tidak lengkap atau tidak sesuai maka dikembalikan kepada Nakhoda).				Form Pemeriksaan Fisik Administratif dalam rangka penerbitan SPB Kapal Perikanan, dokumen permohonan penerbitan SPBm,	10 Menit	Form Pemeriksaan Fisik Administratif dalam rangka penerbitan SPB Kapal Perikanan yang telah diisi
3	Memeriksa, memvalidasi, dan menandatangani, Surat Persetujuan Berlayar				Lembar Surat Persetujuan Berlayar diparaf	5 Menit	Surat Persetujuan Berlayar ditandatangani
4	Mengarsipkan berkas dokumen dan menyampaikan Surat Persetujuan Berlayar kepada Nakhoda.				Surat Persetujuan Berlayar ditandatangani	5 Menit	Surat Persetujuan Berlayar diarsipkan
5	Menerima Surat Persetujuan Berlayar.				Surat Persetujuan Berlayar diarsipkan	5 Menit	Dokumen Surat Persetujuan Berlayar

Gambar 21. SOP Penerbitan SPB

Dari Gambar 2 di atas dapat dijelaskan bahwa berdasarkan SOP yang telah ditetapkan waktu yang dibutuhkan dalam penerbitan SPB adalah 30 menit apabila dokumen persyaratan yang diajukan telah dinyatakan lengkap sejak permohonan diajukan. Proses Penerbitan SPB di PPN palabuhanratu dilaksanakan secara online melalui aplikasi Teman SPB yang telah terintegrasikan dengan beberapa sistem lainnya yang ada pada tingkat Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap. Pelaksanaan penerbitan SPB dilakukan di gedung pelayanan oleh petugas kesyahbandaran yang dilakukan secara bergilir sesuai dengan jadwal piket yang sudah dibuat dan disepakati sebelumnya. Saat ini pelayanan penerbitan SPB di PPN Palabuhanratu dilaksanakan oleh 2 orang . Perikanan dan dibantu oleh 3 orang Petugas Kesyahbandaran. Adapun hasil pelaksanaan kegiatan pelayanan penerbitan SPB pada tahun 2024 sebagaimana pada tabel 7 berikut.

Tabel 9. Penerbitan SPB Periode Januari-Desember Tahun 2024

No	Bulan	Jumlah SPB (Dokumen)
1.	Januari	84
2.	Februari	98
3.	Maret	61
4.	April	66
5.	Mei	74
6.	Juni	87
7.	Juli	77
8.	Agustus	75
9.	September	88
10.	Oktober	95
11.	November	77
12.	Desember	51
Total		933



Gambar 22. Sebaran Bulanan Penerbitan SPB

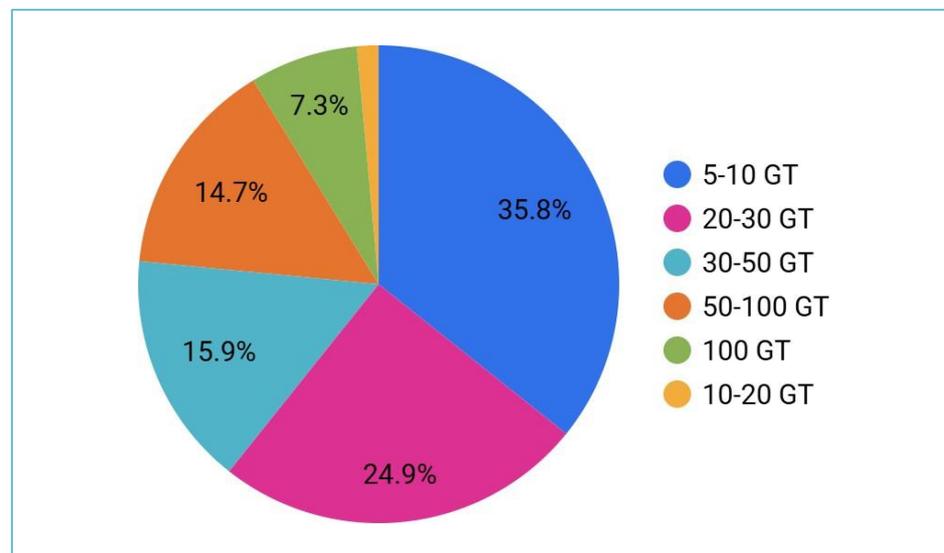
Pada tahun 2024 PPN Palabuhanratu telah menerbitkan sejumlah 933 dokumen SPB dari berbagai ukuran kapal yang memenuhi persyaratan dan ketentuan yang berlaku. Dibandingkan tahun 2023, PPN Palabuhanratu mengalami peningkatan penerbitan SPB yang cukup signifikan di tahun 2024. Hal ini dipengaruhi adanya kapal Pasca Produksi yang bermigrasi dan melakukan pembongkaran PPN Palabuhanratu. Selain itu, Dari Tabel 5 dan Grafik 3 diatas dapat dijelaskan bahwa jumlah penerbitan SPB tertinggi adalah di bulan Februari yaitu sebanyak 98 dokumen sedangkan jumlah penerbitan SPB terendah berada pada bulan Desember yaitu sebanyak 51 dokumen. Tinggi dan rendahnya pelayanan penerbitan SPB pada tahun 2024 di pengaruhi oleh musim penangkapan ikan serta keadaan cuaca gelombang dilaut. Pada musim cuaca buruk dimana gelombang dilaut cukup tinggi akan sangat mengganggu operasional penangkapan ikan dan tentunya memiliki resiko yang tinggi terhadap keselamatan kapal. Jika kondisi seperti ini biasanya kapal-kapal penangkap ikan akan menambatkan kapalnya didermaga. Hal seperti ini tentunya ikut berdampak pada rendahnya permohonan pelayanan penerbitan SPB. Demikian juga hal sebaliknya, jika cuaca gelombang dilaut cukup baik yang disertai dengan musim penangkapan ikan maka kapal-kapal yang ada didermaga akan keluar ke *fishing ground* untuk melakukan aktivitas penangkapan ikan. Dengan meningkatnya aktivitas penangkapan ikan tentu berdampak pada permintaan pelayanan penerbitan SPB sebagaimana penerbitan pada periode bulan Mei-November.

Kapal-kapal yang melakukan aktivitas di PPN Palabuhanratu dan mendapatkan pelayanan penerbitan SPB jika kapal tersebut akan meninggalkan PPN Palabuhanratu terdiri dari berbagai ukuran. Pada umumnya kapal-kapal yang di terbitkan SPBnya di PPN Palabuhanratu berukuran < 30 GT dimana kapal-kapal ini merupakan kapal-kapal yang berizin daerah. Namun demikian kapal-kapal yang

berizin pusat dengan ukuran > 30 GT juga banyak yang diterbitkan. Adapun penerbitan SPB berdasarkan kategori ukuran kapal sebagaimana pada Tabel dan Gambar dibawah ini.

Tabel 10. Penerbitan SPB Berdasarkan Ukuran Kapal (GT)

	Bulan	1-10	11-20	21-30	31-50	51-100	> 100	(Dokumen)
1	Januari	43	2	16	13	9	1	84
2	Februari	42	2	19	17	11	7	98
3	Maret	40	4	7	1	4	5	61
4	April	45	1	9	2	3	6	66
5	Mei	41	1	15	3	7	7	74
6	Juni	44	4	17	5	9	8	87
7	Juli	40	6	12	5	9	5	77
8	Agustus	32	3	18	10	9	3	75
9	September	46	1	20	6	9	6	88
10	Oktober	48	1	18	13	10	5	95
11	November	42		18	7	6	4	77
12	Desember	17	1	13	8	10	2	51
	Total	480	26	182	90	96	59	933



Gambar 23. Sebaran Persentase Penerbitan SPB Berdasarkan Kelompok GT Kapal

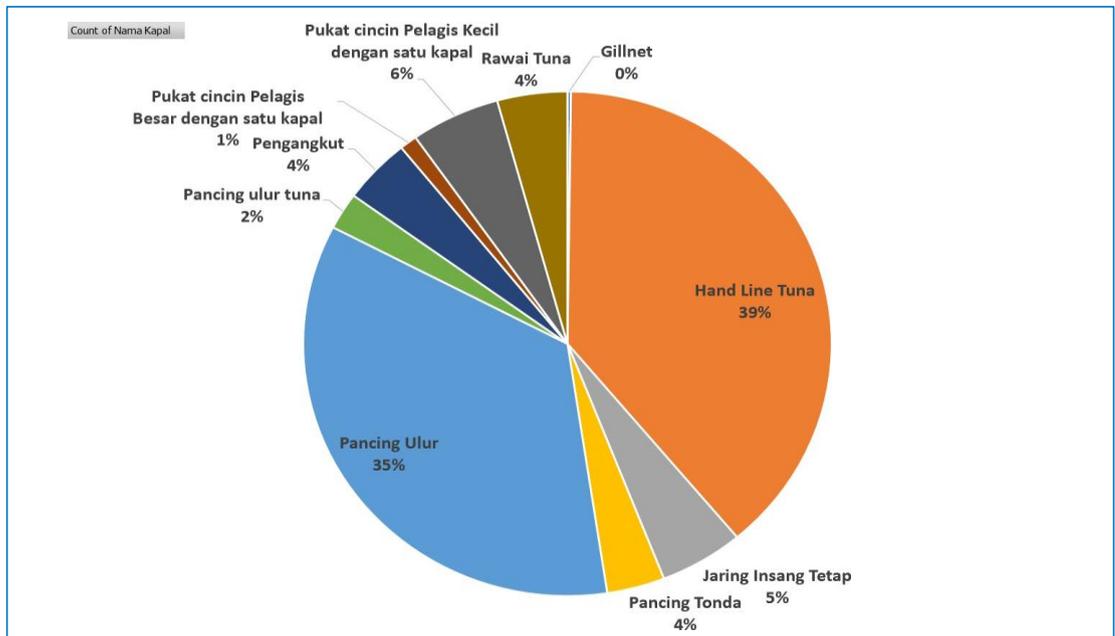
Dari Tabel 6 dan grafik 6 diatas dapat di jelaskan bahwa pada Tahun 2024 penerbitan SPB berdasarkan ukuran kapal di dominasi oleh kapal yang berukuran 5-10 GT sebanyak 480 dokumen (51.4%), kemudian diikuti oleh kapal yang berukuran yang berukuran 21-30 sebanyak 182 dokumen (19.5%) dari total 933 dokumen SPB yang diterbitkan. Hal ini menggambarkan bahwa kapal-kapal yang berpangkalan dan mendapatkan pelayanan penerbitan SPB di PPN Palabuhanratu di dominasi oleh kapal-kapal yang berizin daerah berukuran < 30 GT. Banyaknya dokumen SPB yang diterbitkan untuk kapal yang berukuran 5-10 GT di sebabkan oleh waktu operasi penangkapan pada ukuran tersebut relatif lebih singkat di

banding ukuran kapal lainnya. Dengan waktu operasi penangkapan yang singkat maka aktifitas keluar dan masuk pelabuhan akan semakin sering sehingga berdampak pada tingginya permintaan pelayanan dokumen SPB tersebut.

Penggunaan alat penangkap ikan oleh nelayan-nelayan di PPN Palabuhanratu cukup beragam. Beberapa alat tangkap yang sering digunakan sesuai dengan dokumen perizinan penangkapan ikan yang dimiliki diatas kapal antara lain rawai tuna, pancing ulur, Hand Line, Tonda, pukot cincin, Gill Net, Jaring Insang, serta alat tangkap bubu. Adapun pelayanan penerbitan SPB berdasarkan alat tangkap tersebut sebagai berikut.

Tabel 11. Penerbitan SPB Berdasarkan Alat Tangkap

No	Bulan	API										Total Dokumen
		Gillnet	Hand Line Tuna	Jaring Insang Tetap	Pancing Tonda	Pancing Ulur	Pancing Ulur Tuna	Pengangkut	Pukat cincin Pelagis Besar dengan satu kapal	Pukat cincin Pelagis Kecil dengan satu kapal	Rawai Tuna	
1	Januari	9	50		4	22		5		1	2	84
2	Februari	1	44		8	27		3	1	6	8	98
3	Maret	1	19	4	9	19		3	1	4	1	61
4	April		30	1	5	19			1	6	4	66
5	Mei		18	5	2	34		4	1	7	3	74
6	Juni		33	6	1	34		4	2	6	1	87
7	Juli		25	9		27		5	1	4	6	77
8	Agustus		32	6	1	27		3		3	3	75
9	September		36	4	1	33		4		6	4	88
10	Oktober		41	5		39		4	1	4	1	95
11	November		29	4	2	32		3	1	3	3	77
12	Desember		4	4		14	22	1	1	1	4	51
Total		2	361	48	33	327	22	39	10	51	40	933



Gambar 24. Sebaran Persentase API

Dari grafik diatas dapat dijelaskan bahwa pada tahun 2024 dari jumlah 933 dokumen SPB yang diterbitkan didominasi oleh alat tangkap hand line tuna sebanyak 361 dokumen (39%) dan diikuti oleh alat tangkap pancing ulur sebanyak 327 dokumen (35%) sedangkan alat tangkap pukat cincin pelagis besar (PCPB) merupakan jenis alat tangkap yang paling sedikit yaitu sebanyak 2 dokumen (1%). Jenis alat tangkap pancing merupakan jenis alat tangkap yang dominan berpangkalan di PPN Palabuhanratu yang aktif datang dan pergi untuk melakukan aktifitas penangkapan ikan. Hal ini sesuai dengan karakteristik daerah penangkapan yang ada di PPN Palabuhanratu di mana kondisi perairan yang dalam serta target ikan yang akan ditangkap merupakan jenis ikan pelagis besar seperti tuna, marlin, meka, dan lainnya sehingga sangat memungkinkan untuk tertangkap dengan menggunakan alat tangkap pancing. Alat tangkap pukat cincin merupakan jenis alat tangkap yang paling sedikit dikarenakan kapal-kapal yang memiliki izin penangkapan tersebut umumnya memiliki ukuran yang besar. Dengan ukuran GT yang besar dan kondisi kolam pelabuhan PPN Palabuhanratu yang sudah mengalami pendangkalan maka kapal-kapal tersebut cenderung menggunakan PPN Palabuhanratu hanya sebagai *fishing base* alternatif.

4.2.3 Penerbitan Surat tanda Bukti lapor Kedatangan Kapal (STBLKK)

STBLK kapal merupakan salah satu produk pelayanan kesyahbandaran yang diberikan kepada pelaku usaha penangkapan ikan/stakeholder. STBLK kapal perikanan adalah dokumen yang diterbitkan oleh kesyahbandaran pada saat kapal datang setelah dokumen kapal perikanan dinyatakan lengkap dan sah sesuai aturan yang berlaku. Adapun persyaratan untuk penerbitan STBLK Kedatangan sesuai Permen KP Nomor 03 Tahun 2013 adalah sebagai berikut :

1. Dokumen Kapal dan Perijinan Perikanan yang masih berlaku (Pass kapal, SIPI, SIUP, Sertifikat kalaikan kapal perikanan,dll);
2. SPB Asal
3. Logbook penangkapan ikan;
4. SLO Asal;

Penerbitan STBLK kapal di PPN Palabuhanratu sudah dilaksanakan secara online melalui aplikasi Teman SPB yang sudah terintegrasikan dan sesuai dengan SOP yang berlaku. Pelayanan STBL -Kedatangan di PPN Palabuhanratu sudah berstandar ISO:9001-2015. Berikut adalah alur penerbitan STBLK di PPN

Palabuhanratu tahun 2024 :

No	Uraian Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku		
		Nakhoda	Pengadministrasi Sarana dan Prasarana	Syahbandar di Pelabuhan Perikanan	Kelengkapan	Waktu	Output
1	Melapor rencana kedatangan kapal dan selanjutnya menyerahkan dokumen kapal dan LBPI				Dokumen Kapal	15 Menit	Form Surat Tanda Bukti Laport Kedatangan Kapal dan dokumen
2	Memeriksa dokumen kapal, mengisi dan memverifikasi form STBL Kedatangan Kapal (Jika ya menyampaikan kepada Syahbandar di Pelabuhan Perikanan dan Jika tidak dikembalikan kepada nakhoda untuk dilengkapi.				Form Surat Tanda Bukti Laport Kedatangan Kapal dan dokumen	5 Menit	Form Surat Tanda Bukti Laport Kedatangan Kapal diparaf
3	Memeriksa Form Surat Tanda Bukti Laport Kedatangan Kapal (jika ya menandatangani Form Surat Tanda Bukti Laport Kedatangan Kapal , serta menentukan lokasi tambat-labuh kapal perikanan. dan jika tidak dikembalikan ke penyusun bahan kesyahbandaran untuk dilengkapi				Form Surat Tanda Bukti Laport Kedatangan Kapal diparaf	5 Menit	Form STBL Kedatangan Kapal ditandatangani
4	Mendokumentasikan dokumen STBL Kedatangan dan menunjukkan lokasi tambat-labuh				Form STBL Kedatangan Kapal ditandatangani	5 Menit	STBL Kedatangan Kapal Perikanan
5	Menerima Surat Tanda Bukti Laport Kedatangan Kapal Perikanan dan informasi lokasi tambat labuh kapal				STBL Kedatangan Kapal Perikanan	3 Menit	Dokumen STBL Kedatangan Kapal Perikanan

Gambar 25. SOP Penerbitan Dokumen STBLKK

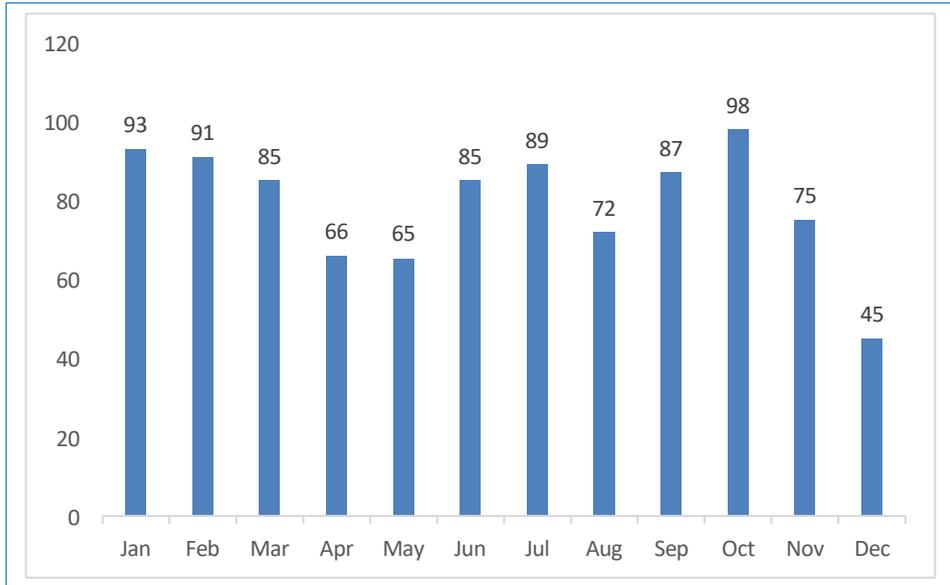
Berdasarkan dengan SOP yang telah ditetapkan, lama waktu penerbitan STBL Kedatangan adalah 33 menit semenjak pengajuan dengan persyaratan lengkap. Sedangkan untuk mekanismenya adalah pelaku usaha harus melaporkan rencana kedatangan dengan menyerahkan dokumen kapal kepada petugas syahbandar untuk diperiksa kelengkapannya. Petugas memasukkan data ke dalam sistem teman SPB secara online sesuai dengan dokumen, kemudian diverifikasi oleh syahbandar. Apabila dalam verifikasi masih ada kekurangan maka akan dikembalikan kepada pelaku usaha untuk di penuhi, jika sudah lengkap dan sah maka akan divalidasi dan dicetak untuk di tanda tangani oleh syahbandar.

Pada tahun 2024 PPN Palabuhanratu telah menerbitkan STBL Kedatangan sebanyak 951 dokumen sebagaimana pada tabel bawah ini.

Tabel 12. Penerbitan STBL Kedatangan Periode Januari-Desember Tahun 2024

No	Bulan	Jumlah STBLK (Dokumen)
1.	Januari	93
2.	Februari	91
3.	Maret	85
4.	April	66
5.	Mei	65
6.	Juni	85

7.	Juli	89
8.	Agustus	72
9.	September	87
10.	Oktober	98
11.	November	75
12.	Desember	45
Total		951



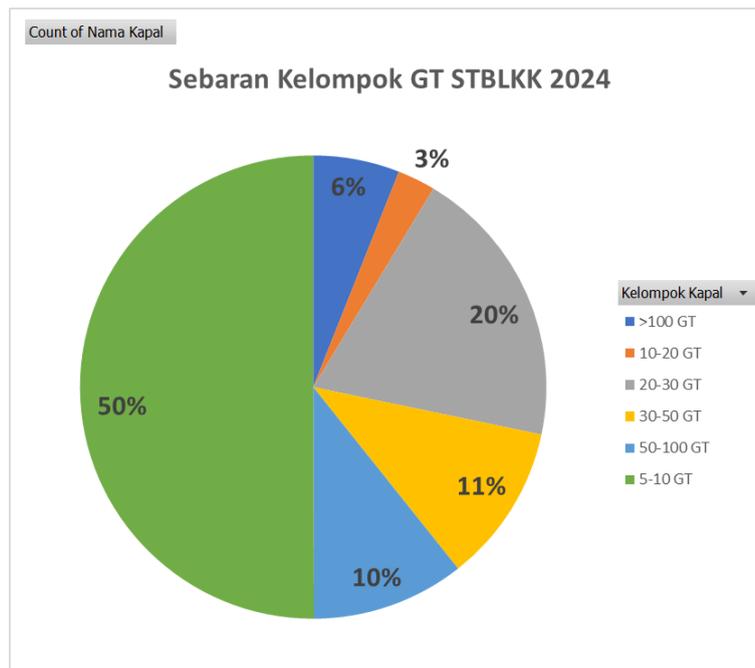
Gambar 26. Penerbitan Dokumen STBLKK Perbulan

Dari Gambar diatas dapat dijelaskan bahwa pada tahun 2024 jumlah penerbitan STBL Kedatangan tertinggi pada bulan Oktober sebanyak 98 dokumen dari total 951 dokumen yang diterbitkan. Sedangkan STBL Kedatangan terendah sebanyak 45 dokumen berada pada bulan Desember. Tinggi rendahnya pelayanan penerbitan STBL Kedatangan berbanding lurus dengan jumlah penerbitan pelayanan SPB. Faktor kondisi cuaca dan musim penangkapan ikan adalah hal-hal yang mempengaruhi terhadap jumlah pelayanan penerbitan STBLK tersebut.

Sedangkan ditinjau dari jumlah STBL yang terbit berdasarkan ukuran kapal, dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 13. Jumlah STBL Kedatangan Berdasarkan Ukuran Kapal (GT)

No	Bulan	Ukuran Kapal (GT)						Jumlah (Dokumen)
		1-10	10-20	20-30	30-50	50-100	>100	
1	Januari	40	2	20	17	13	1	93
2	Februari	42	2	18	13	7	9	91
3	Maret	48	4	8	13	8	4	85
4	April	45	1	9	2	3	6	66
5	Mei	37	1	12	4	7	4	65
6	Juni	41	3	18	6	9	8	85
7	Juli	43	6	12	9	14	5	89
8	Agustus	31	4	23	6	4	4	72
9	September	45	1	17	8	11	5	87
10	Oktober	51		21	11	10	5	98
11	November	36		18	9	8	4	75
12	Desember	17	1	11	7	7	2	45
Total		476	25	187	105	101	57	951



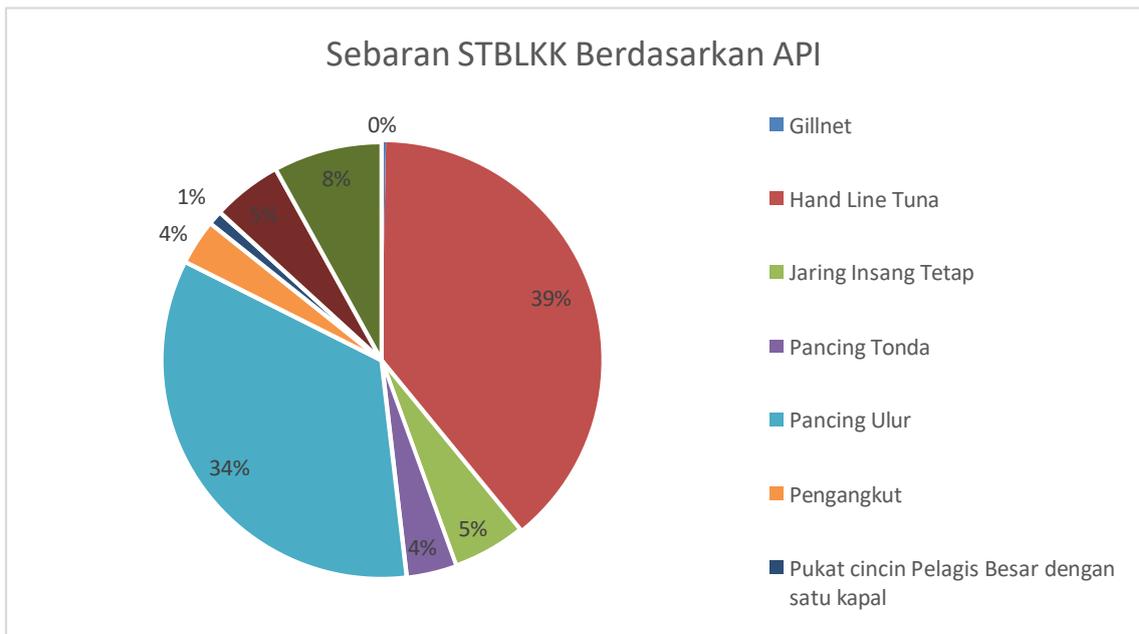
Gambar 27. Persentase Penerbitan STBL-K Berdasarkan Ukuran Kapal

Berdasarkan ukuran kapal (GT) jumlah STBL Kedatangan yang diterbitkan di PPN Palabuhanratu didominasi oleh kapal ukuran 5 – 10 GT sebesar 476 dokumen. Hal ini wajar terjadi karena kapal 5 – 10 GT memiliki waktu trip yang singkat dan jumlah trip yang banyak dibandingkan dengan kapal ukuran diatas 10 GT lainnya. Disamping itu jumlah kapal 5 – 10 GT juga lebih banyak dibandingkan dengan uktan lainnya.

Apabila ditinjau dari segi penerbitan STBL Kedatangan yang diterbitkan di PPN Palabuhan berdasarkan API dapat dilihat pada tabel dan grafik dibawah ini.

Tabel 14. Penerbitan STBL Kedatangan Berdasarkan Alat Tangkap

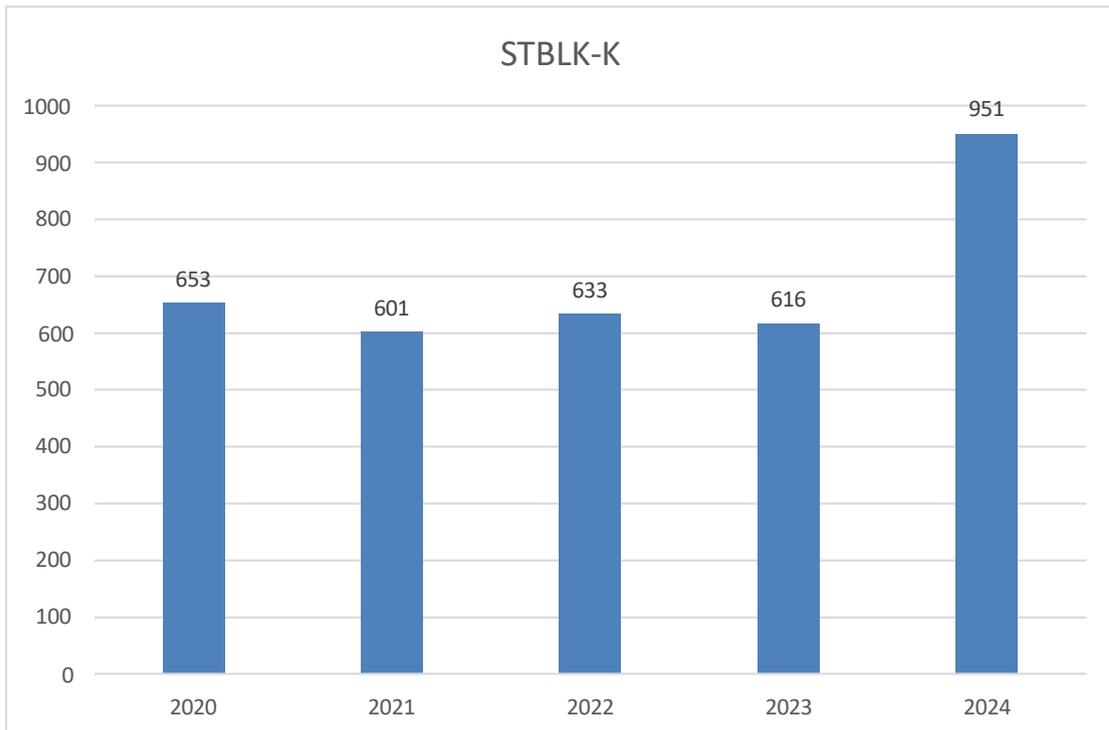
Bulan	Gillnet	Hand Line Tuna	Jaring Insang Tetap	Pancing Tonda	Pancing Ulur	Pengangkut	Pukat cincin Pelagis Besar dengan satu kapal	Pukat cincin Pelagis Kecil dengan satu kapal	Rawai Tuna	Total
Jan		51		5	21	5		1	10	93
Feb	2	34		7	28	3	2	7	8	91
Mar	1	37	4	10	20	3		4	6	85
Apr		30	1	5	19		1	6	4	66
May		18	5	2	29	3	1	4	3	65
Jun		29	7	2	31	3	2	6	5	85
Jul		32	9		30	4	1	4	9	89
Aug		25	8	1	27	2		4	5	72
Sep		32	3	1	36	4		5	6	87
Oct		42	5		37	3	1	4	6	98
Nov		23	5	2	31	1	1	3	9	75
Dec		16	4		17	1	1	1	5	45
Total	3	369	51	35	326	32	10	49	76	951



Gambar 28. Persentase Penerbitan STBL-K Berdasarkan API

Jumlah penerbitan STBL Kedatangan berdasarkan API, pada tahun 2024 didominasi oleh hand line tuna dan pancing ulur. Hal ini sesuai dengan jenis

tangkapan yang didapati Sebagian besar adalah Tongkol, Tuna dan Cakalang.



Gambar 29. Jumlah Penerbitan STBLK 5 tahun terakhir

Penerbitan STBL Kedatangan dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 mengalami naik turun, sedangkan di tahun 2024 sendiri STBL Kedatangan yang diterbitkan oleh PPN Palabuhanratu mengalami peningkatan signifikan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Adapun faktor yang mempengaruhi tingkat penurunan penerbitan STBL Kedatangan adalah sebagai berikut:

1. Semakin banyak kapal dengan pangkalan PPN Palabuhanratu yang mulai melakukan proses pembongkaran di PPN Palabuhanratu.
2. Meningkatnya migrasi kapal izin daerah menjadi kapal izin pusat;
3. Meningkatnya tingkat kesadaran pelaku usaha untuk tertib lapor baik datang maupun berangkat.

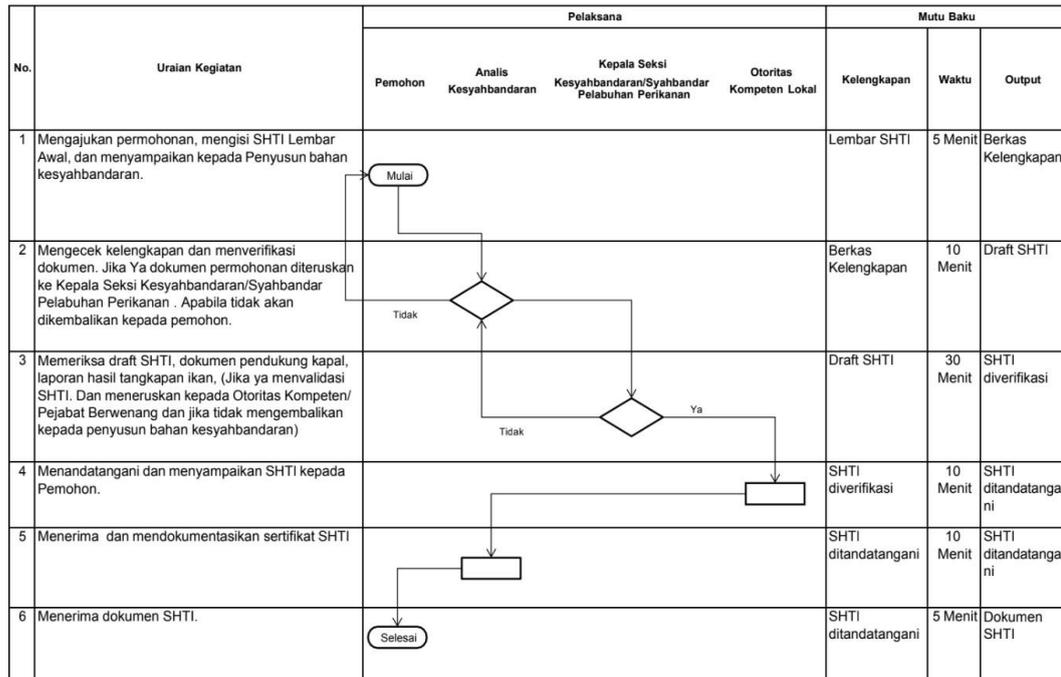
4.2.4 Penerbitan Sertifikat Hasil Tangkapan Ikan (SHTI)

Sertifikat Hasil Tangkapan Ikan (SHTI) adalah surat keterangan yang menyatakan bahwa hasil perikanan yang diekspor bukan dari kegiatan *Illegal, Unreported, and Unregulated (IUU) Fishing*. SHTI merupakan salah satu dokumen penyerta yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha perikanan ketika melakukan ekspor hasil tangkapan. Selain untuk mencegah terjadinya *IUU fishing*, juga memberikan jaminan kepada pembeli terkait kejelasan asal usul ikan. PPN Palabuhanratu merupakan salah satu Otoritas Kompeten Lokal (OKL) yang berwenang menerbitkan SHTI di wilayah Jawa Barat khususnya wilayah Sukabumi dan sekitarnya, sehingga SHTI menjadi salah satu produk layanan yang ada di PPN Palabuhanratu. Dan pelayanan SHTI di PPN Palabuhanratu sudah dilaksanakan secara online melalui aplikasi SHTI yang sudah terintegrasikan dan berdasarkan ISO : 90001 sehingga memberikan jaminan kepada pengguna jasa baik dari segi waktu maupun produk yang diberikan.

SHTI digunakan sebagai kelengkapan dokumen ekspor untuk hasil tangkapan ikan di laut yang berasal dari kapal penangkap ikan Indonesia dan kapal penangkap ikan asing. Sertifikat Hasil Tangkapan Ikan bertujuan:

- 1). Memperlancar kegiatan perdagangan hasil tangkapan ikan dari laut oleh kapal penangkap ikan Indonesia dan/atau kapal penangkap ikan asing baik secara langsung maupun tidak langsung dipasarkan ke Uni Eropa;
- 2). Membantu upaya nasional dan internasional dalam memberantas (menghindari, melawan dan memerangi) kegiatan *IUU Fishing*;
- 3). Memastikan penelusuran (*traceability*) hasil tangkapan ikan pada tahapan penangkapan, pengolahan, pengangkutan dan pemasaran;
- 4). Melaksanakan ketentuan konservasi dan pengelolaan sumber daya perikanan secara berkelanjutan.

Secara garis besar waktu yang diperlukan untuk penerbitan SHTI sesuai SOP adalah 30 menit semenjak pengajuan dengan dokumen lengkap dan sah. Berikut adalah alur penerbitan SHTI secara umum.



Gambar 30. Alur Prosedur penerbitan SHTI

Sistem dan mekanisme diawali dengan permohonan dari pemohon dengan menyerahkan surat pengajuan permohonan beserta kelengkapan persyaratannya. Kemudian petugas SHTI melakukan pemeriksaan awal dokumen yaitu memeriksa dan memverifikasi kelengkapan dokumen sebelum di input ke dalam aplikasi SHTI secara online, apabila persyaratan masih ada yang kurang maka dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi. Syahbandar menganalisa dan memverifikasi ulang kesesuaian keabsahan dokumen dengan persyaratan, apabila ada yang belum sesuai maka akan dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi. Jika sudah lengkap syahbandar melakukan validasi dan kemudian dicetak untuk ditandatangani.

Pada tahun 2024 PPN Palabuhanratu menerbitkan 2 SHTI berupa lembar turunan, dan lembar turunan disederhanakan, serta dokumen lembar awal. Jumlah dan persebaran dokumen dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 15. Jumlah SHTI Tahun 2024

No	Bulan	Jumlah Penerbitan SHTI (Dokumen)			Lembar Awal (Dokumen)
		LT	LTS	Impor	LA
1	Januari	97	72	0	83
2	Februari	107	57	0	43
3	Maret	23	27	0	65
4	April	229	61	0	38
5	Mei	127	56	0	13
6	Juni	144	88	0	155
7	Juli	272	88	0	173
8	Agustus	87	36	0	42
9	September	320	113	0	77
10	Oktober	209	66	0	64
11	November	26	37	0	26
12	Desember	7	26	0	56
	Total	1648	727	0	835

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa penerbitan lembar turunan adalah yang terbanyak dengan total 1648 lembar, dengan proporsi penerbitan terbanyak terjadi di Bulan September. Selanjutnya, terdapat 727 lembar turunan disederhanakan yang diterbitkan di PPN Palabuhanratu dengan bulan penerbitan terbanyak terjadi dibulan September. Lalu, untuk lembar awal, pada tahun 2024, terdapat peningkatan signifikan dengan jumlah penerbitan mencapai 835 lembar dokumen yang terbit. Terakhir, tidak ada lembar SHTI impor yang terbit selama tahun 2024.

Ditinjau dari produksi ikan yang didaratkan, penerbitan SHTI dan dokumen lembar awal dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 16. Jumlah Produksi SHTI

Bulan	Dokumen LA	SHTI		Total Per Bulan
		LT	LTS	
Januari	275.042	191.069	1.491.111	1.957.221
Februari	104.152	304.843	1.122.972	1.531.967
Maret	265.154	95.500	591.840	952.494
April	56.584	596.802	1.081.573	1.734.959
Mei	49.222	315.933	1.121.669	1.486.823
Juni	421.374	274.020	1.775.067	2.470.461
Juli	411.329	658.303	1.497.017	2.566.648
Agustus	155.775	289.609	708.438	1.153.822
September	289.036	641.365	1.725.136	2.655.537

Bulan	Dokumen LA	SHTI		Total Per Bulan
		LT	LTS	
Oktober	260.895	482.242	1.182.572	1.925.709
November	14.946	65.952	597.047	677.944
Desember	132.497	27.840	435.896	596.233
Total Per SHTI	2.436.006	3.943.475	13.330.336	19.709.817

Berdasarkan tabel diatas, total selama tahun 2024 didapati volume ikan yang tercakup dalam SHTI dan Lembar Awal dokumen sebesar 19.709.817 kg. Jumlah ini didominasi oleh volume dari sertifikat LTS sebesar 13.330.336 kg, disusul oleh LT dengan volume sebesar 3.943.475 kg, dan LA sebesar 2.436.006 kg..

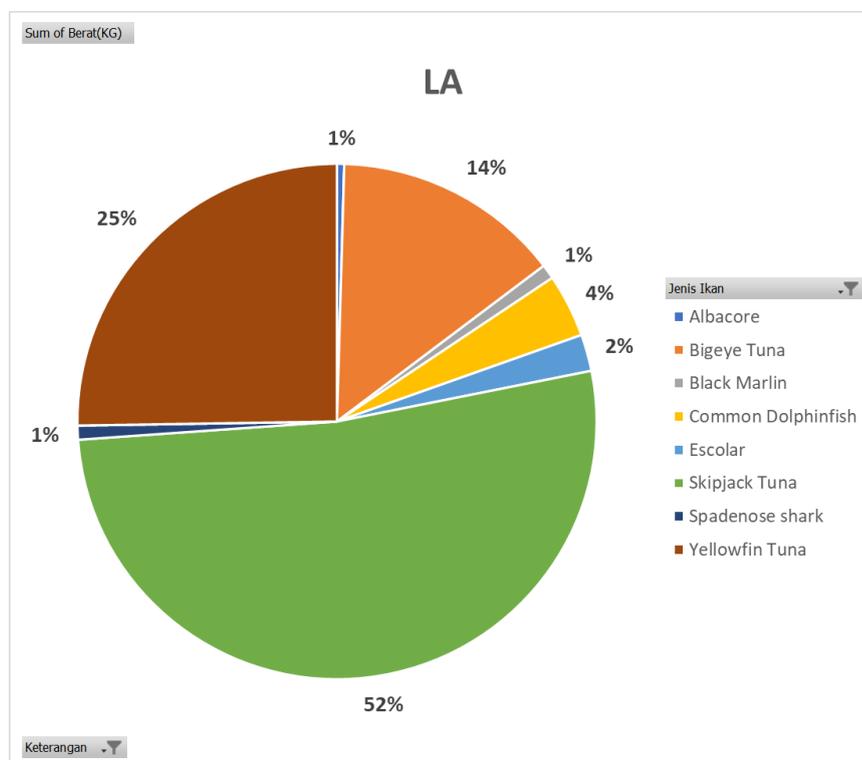
Untuk lembar turunan yang disederhanakan, volume produksi yang diterbitkan terbanyak terjadi di bulan Juni dengan total produksi sebesar 1.775.067 kg. Untuk lembar turunan, volume produksi yang diterbitkan terbanyak terjadi pada bulan Juli dengan total produksi mencapai 658.303 kg, dan volume produksi yang paling kecil terjadi pada bulan Desember dengan total hanya 27.840 kg. Namun, untuk Dokumen Lembar Awal, volume ikan yang diterbitkan terbanyak terjadi di Bulan Juni, dengan total volume sebanyak 421.374 kg.

Ditinjau dari jenis ikan yang didaratkan, SHTI dan dokumen lembar awal dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 17 Volume Produksi Ikan Per Jenis SHTI dan dokumen Lembar Awal

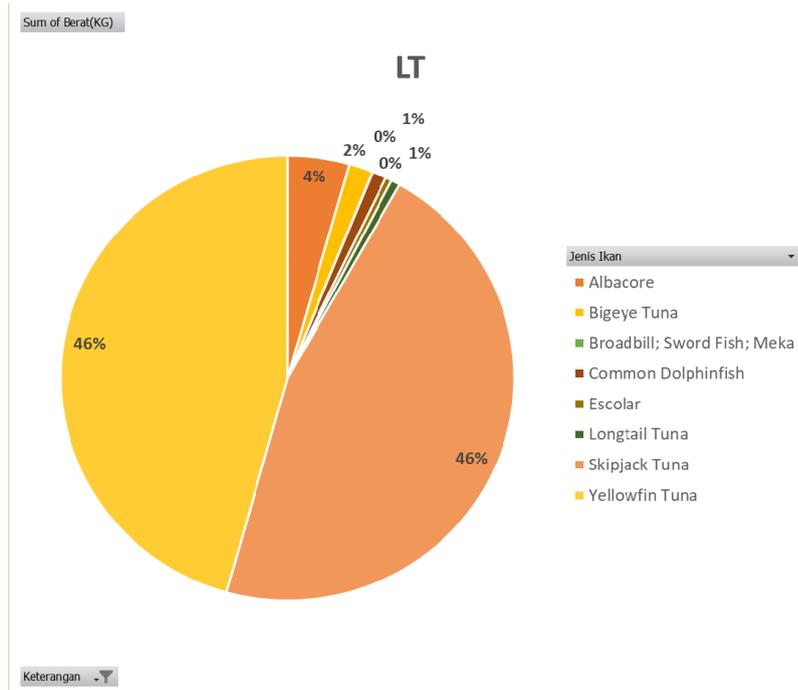
Jenis Ikan	Dokumen LA	SHTI		Total Jenis Per Ikan
		LT	LTS	
<i>Albacore</i>	10.804	173.976	173.647	358.427
<i>Barracuda; Sphyraena sp</i>	6	0	0	6
<i>Bigeye Thresher</i>	4.866	0	0	4.866
<i>Bigeye Tuna</i>	340.062	66.851	381.200	788.112
<i>Black Marlin</i>	21.684	0	0	21.684
<i>Blue Marlin</i>	104	0	0	104
<i>Broadbill; Sword Fish; Meka</i>	10.639	908	0	11.547
<i>Bullet Thuna</i>	5.892	0	0	5.892
<i>Common Dolphinfish</i>	94.878	39.952	0	134.830
<i>Escolar</i>	54.953	17.728	28.448	101.129
<i>Great barracuda</i>	24	0	0	24
<i>Indian scad</i>	5.989	0	0	5.989
<i>Indo-Pacific Sailfish; Bayonet</i>	3.098	0	0	3.098
<i>Longtail Tuna</i>	802	25.000	0	25.802
<i>Mako sharks</i>	11	0	0	11
<i>Moon Fish ; Opah</i>	586	0	0	586
<i>Narrow-Barred Spanish Mackerel</i>	316	0	0	316

<i>Pickhandle Barracuda</i>	7	0	0	7
<i>Rainbow Runner</i>	1.450	0	0	1.450
<i>Sattooth Barracuda</i>	67	0	0	67
<i>Sickle Pomfret</i>	151	0	0	151
<i>Skipjack Tuna</i>	1.244.127	1.818.719	4.869.665	7.932.511
<i>Snake Mackerel; Oilfish</i>	36	0	0	36
<i>Spadenose shark</i>	20.949	0	0	20.949
<i>Spotted-Spanish Mackerel; Indo-Pasific King Mackerel</i>	2.566	0	0	2.566
<i>Streaked Spanish Mackerel</i>	281	0	0	281
<i>Wahoo</i>	6.511	0	0	6.511
<i>Yellowfin Tuna</i>	603.912	1.800.342	7.877.377	10.281.631
Total Per Dokumen	2.436.006	3.943.475	13.330.336	19.709.817

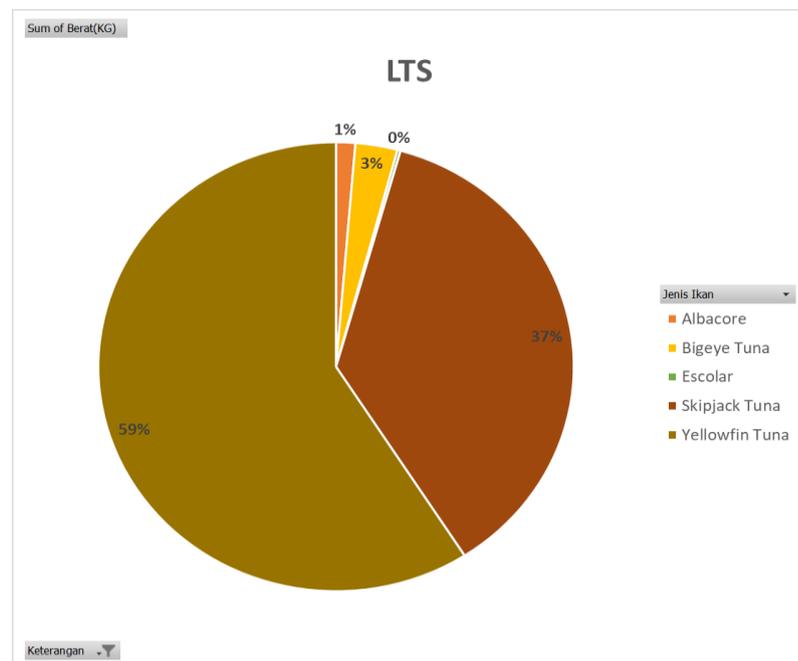


Gambar 31. Volume Produksi LA Berdasarkan Jenis Ikan

Dari grafik tersebut jenis ikan yang dominan adalah ikan *Skipjack Tuna*, dengan total tangkapan untuk ketiga sertifikat sebanyak 1.244 ton, hal ini sejalan dikarenakan ikan tersebut merupakan target utama dalam operasi penangkapan di PPN Palabuhanratu.



Gambar 32. Volume Produksi LT Berdasarkan Jenis Ikan



Gambar 33. Volume Produksi LTS Berdasarkan Jenis Ikan

4.2.5 Kegiatan Pengecekan Kelaikan Kapal Perikanan

Pada tahun 2024 Pelabuhan Perikanan Palabuhanratu memasuki tahun ketigاس dalam menerima pelayanan penerbitan Sertifikat Kelaikan Kapal Perikanan. Pada penerbitan ini dilakukan pemeriksaan menyeluruh pada kapal perikanan dengan keselamatan kerja sebagai penekanan utama. Adapun pemeriksaan tersebut meliputi:

1. Kesesuaian alat penangkapan ikan dan alat bantu penangkapan ikan;
2. Palka ikan dan jenis mesin pendingin;
3. Sticker barcode;
4. Kelaikan kapal perikanan dan teknis permesinan;
5. Peralatan pencegahan pencemaran;
6. Alat komunikasi;
7. Peralatan navigasi;
8. Peta dan perlengkapannya;
9. Alat keselamatan;
10. Alat pemadam kebakaran;
11. Tanda pengenal kapal perikanan.

Hingga akhir tahun 2024, terdapat 132 kapal yang telah diterbitkan oleh Petugas Kelaikan PPN Palabuhanratu. Dengan begitu hingga saat ini sudah ada 182 sertifikat kapal yang diterbitkan oleh PPN Palabuhanratu

Tabel 18. List Pengecekan Kelaikan Kapal Perikanan Melalui Surat Edaran

Nomor	Nomor Sertifikat	Nama Kapal	Tanggal
1	B.2321/PPN.PLR/PI.210/VIII/2023	HIDRA 01	07/08/2023
2	B.1870/PPN.PLR/PI.210/VII/2023	JAYA MITRA 9	06/07/2023
3	B.1867/PPN.PLR/PI.210/VII/2023	CAHAYA BARAT 88	06/07/2023
4	B.1866/PPN.PLR/PI.210/VII/2023	CAHAYA TIMUR 88	06/07/2023
5	B.1865/PPN.PLR/PI.210/VII/2023	INDRA JM 01	06/07/2023
6	B.1864/PPN.PLR/PI.210/VII/2023	INDRA JM 02	06/07/2023
7	B.1863/PPN.PLR/PI.210/VII/2023	JAYA MINA 02	06/07/2023
8	B.1862/PPN.PLR/PI.210/VII/2023	MANDIRI JAYA 02	06/07/2023
9	B.1564/PPN.PLR/PI.210/VI/2023	JAYA MINA 01	27/06/2023
10	B.1563/PPN.PLR/PI.210/VI/2023	LANCAR JAYA 02	27/06/2023
11	B.1562/PPN.PLR/PI.210/VI/2023	JAYA MITRA - 888	27/06/2023

12	B.1561/PPN.PLR/PI.210/VI/2023	ARWANA - 11	27/06/2023
13	B.1560/PPN.PLR/PI.210/VI/2023	ARWANA 09	27/06/2023
14	B.1559/PPN.PLR/PI.210/VI/2023	BOGOR 8	27/06/2023
15	B.1396/PPN.PLR/PI.210/VI/2023	KASIH ALAM	13/06/2023
16	B.1395/PPN.PLR/PI.210/VI/2023	RESTU JAYA 3	13/06/2023
17	B.1211/PPN.PLR/PI.210/V/2023	MUDAH JAYA	22/05/2023
18	B.1210/PPN.PLR/PI.210/V/2023	LANCAR JAYA 01	22/05/2023
19	B.1209/PPN.PLR/PI.210/V/2023	HIDAYAH 03	22/05/2023
20	B.1208/PPN.PLR/PI.210/V/2023	AOFA 03	22/05/2023
21	B.1207/PPN.PLR/PI.210/V/2023	AOFA 1	22/05/2023
22	B.1105/PPN.PLR/PI.210/V/2023	MJM II	15/05/2023
23	B.1104/PPN.PLR/PI.210/V/2023	MJM I	15/05/2023
24	B.1103/PPN.PLR/PI.210/V/2023	KARYA MAJU SAMUDRA X	15/05/2023
25	B.1102/PPN.PLR/PI.210/V/2023	SERBA PRIMA	15/05/2023
26	B.937/PPN.PLR/PI.210/IV/2023	HARAPAN MAJU	18/04/2023
27	B.936/PPN.PLR/PI.210/IV/2023	AOFA 02	18/04/2023
28	B.935/PPN.PLR/PI.210/IV/2023	CITRA BAHARI 02	18/04/2023
29	B.934/PPN.PLR/PI.210/IV/2023	CITRA BAHARI 01	18/04/2023
30	B.909/PPN.PLR/PI.210/IV/2023	CITRA BAHARI 07	17/04/2023
31	B.908/PPN.PLR/PI.210/IV/2023	CITRA BAHARI 08	17/04/2023
32	B.862/PPN.PLR/PI.210/IV/2023	DOA IBU - 02	10/04/2023
33	B.861/PPN.PLR/PI.210/IV/2023	MANDIRI JAYA 01	10/04/2023
34	B.701/PPN.PLR/PI.210/III/2023	MAJU JAYA - 168	29/03/2023
35	B.185/PPN.PLR/PI.210/I/2023	KASIH ALAM	30/01/2023
36	B.001/PPN.PLR/PI.210/XII/2023	DOA ABDI 2	08/12/2023
37	B.002/PPN.PLR/PI.210/XII/2023	KALEBAS 10	08/12/2023
38	B.003/PPN.PLR/PI.210/XII/2023	DOA ABDI 1	19/12/2023
39	B.004/PPN.PLR/PI.210/XII/2023	PERKASA 11	27/12/2023
40	B.005/PPN.PLR/PI.210/XII/2023	A SABILA 13	27/12/2023
41	B.006/PPN.PLR/PI.210/XII/2023	PERKASA 9	27/12/2023
42	B.007/PPN.PLR/PI.210/XII/2023	MAKMUR JAYA 01	28/12/2023
43	B.008/PPN.PLR/PI.210/XII/2023	DOA IBU 01	28/12/2023
44	B.009/PPN.PLR/PI.210/XII/2023	DOA IBU 05	28/12/2023

45	B.010/PPN.PLR/PI.210/XII/2023	HIDAYAH 01	28/12/2023
46	B.011/PPN.PLR/PI.210/XII/2023	HIDAYAH 02	28/12/2023
47	B.012/PPN.PLR/PI.210/XII/2023	JOHOR 9	28/12/2023
48	B.013/PPN.PLR/PI.210/XII/2023	HALWA	29/12/2023
49	B.014/PPN.PLR/PI.210/XII/2023	HIDAYAH 04	29/12/2023
50	B.015/PPN.PLR/PI.210/XII/2023	HIDAYAH 05	29/12/2023
51	B.029/PPN.PLR/PI.210/VI/2024	CAHAYA BONE 4A	03/06/2024
52	B.028/PPN.PLR/PI.210/VI/2024	CAHAYA BONE-1	03/06/2024
53	B.032/PPN.PLR/PI.210/VI/2024	CAHAYA BONE 3	03/06/2024
54	B.031/PPN.PLR/PI.210/VI/2024	ANGGUN JAYA 5	03/06/2024
55	B.030/PPN.PLR/PI.210/VI/2024	SUNDAWA LAUT	03/06/2024
56	B.033/PPN.PLR/PI.210/VI/2024	BURDAH 02	03/06/2024
57	B.062/PPN.PLR/PI.210/VII/2024	MUTIARA JAYA1	17/07/2024

58	B.063/PPN.PLR/PI.210/VII/2024	SUMBER KAWITAN	17/07/2024
59	B.065/PPN.PLR/PI.210/VII/2024	BUNGA MEKAR TIGA	17/07/2024
60	B.066/PPN.PLR/PI.210/VII/2024	BAGJA BAHARI 03	17/07/2024
61	B.071/PPN.PLR/PI.210/VII/2024	SUKMA JAYA 03	17/07/2024
62	B.068/PPN.PLR/PI.210/VII/2024	JUNIOR - 02	17/07/2024
63	B.072/PPN.PLR/PI.210/VII/2024	PUTRI OSCAR	26/07/2024
64	B.105/PPN.PLR/PI.210/VIII/2024	DE ROSYID	20/08/2024
65	B.104/PPN.PLR/PI.210/VIII/2024	BENUA INDAH ZR	20/08/2024
66	B.103/PPN.PLR/PI.210/VIII/2024	AMELIA PUTRI	20/08/2024
67	B.102/PPN.PLR/PI.210/VIII/2024	PUTRA GILIRENG	20/08/2024
68	B.101/PPN.PLR/PI.210/VIII/2024	MILA 1	20/08/2024
69	B.100/PPN.PLR/PI.210/VIII/2024	MILA KARMILA	20/08/2024
70	B.099/PPN.PLR/PI.210/VIII/2024	AFATAR	20/08/2024
71	B.098/PPN.PLR/PI.210/VIII/2024	JABAL NUR A	20/08/2024
72	B.097/PPN.PLR/PI.210/VIII/2024	JABAL NUR C	20/08/2024
73	B.106/PPN.PLR/PI.210/VIII/2024	SITI ERLINDA	20/08/2024
74	B.022/PPN.PLR/PI.210/VI/2024	BURDAH 03	03/06/2024
75	B.023/PPN.PLR/PI.210/VI/2024	ANGGUN JAYA AB	03/06/2024
76	B.020/PPN.PLR/PI.210/VI/2024	MEKAR INDAH 03	03/06/2024

77	B.024/PPN.PLR/PI.210/VI/2024	RAIHAN EXPRES 03	03/06/2024
78	B.076/PPN.PLR/PI.210/VIII/2024	DOA IBU SR 05	01/08/2024
79	B.111/PPN.PLR/PI.210/VIII/2024	BM PUTRI 03	20/08/2024
80	B.110/PPN.PLR/PI.210/VIII/2024	RAJAWALI ESA 02	20/08/2024
81	B.107/PPN.PLR/PI.210/VIII/2024	TIGA PUTRI SATU	20/08/2024
82	B.109/PPN.PLR/PI.210/VIII/2024	TIGA PUTRI DUA	20/08/2024
83	B.077/PPN.PLR/PI.210/VIII/2024	DOA IBU D I 01	01/08/2024
84	B.078/PPN.PLR/PI.210/VIII/2024	DOA IBU MA 02	01/08/2024
85	B.079/PPN.PLR/PI.210/VIII/2024	BAGJA BAHARI 02	01/08/2024
86	B.112/PPN.PLR/PI.210/VIII/2024	PUJA SRI	20/08/2024
87	B.108/PPN.PLR/PI.210/VIII/2024	PUTRA PUJA SRI	20/08/2024
88	B.113/PPN.PLR/PI.210/VIII/2024	AYU WIJAYA 01	26/08/2024
89	B.116/PPN.PLR/PI.210/IX/2024	JAYA BAKTI 07	27/09/2024
90	B.118/PPN.PLR/PI.210/IX/2024	DO'A IBU MAJU NELAYAN	27/09/2024

91	B.117/PPN.PLR/PI.210/IX/2024	JAYA BAKTI 08	27/09/2024
92	B.119/PPN.PLR/PI.210/IX/2024	HIDUP BARU 2	27/09/2024
93	B.120/PPN.PLR/PI.210/IX/2024	BUNGA MAKMUR 01	27/09/2024
94	B.121/PPN.PLR/PI.210/IX/2024	KERSA MUKTI I	30/09/2024
95	B.128/PPN.PLR/PI.210/X/2024	MAULANA JAYA 03	24/10/2024
96	B.129/PPN.PLR/PI.210/X/2024	RIFQI JAYA 2	14/10/2024
97	B.131/PPN.PLR/PI.210/X/2024	BUNGA MULYA - 04	14/10/2024
98	B.130/PPN.PLR/PI.210/X/2024	BUNGA MULYA - 02	14/10/2024
99	B.003/PPN.PLR/PI.210/II/2024	PUTRA CIKAL YDT 3	26/02/2024
100	B.002/PPN.PLR/PI.210/I/2024	PUTRA CIKAL YDT 2	29/01/2024
101	B.006/PPN.PLR/PI.210/II/2024	BUNGA MULYA 6	26/02/2024
102	B.005/PPN.PLR/PI.210/II/2024	BUNGA MAKMUR 2	26/02/2024
103	B.016/PPN.PLR/PI.210/VI/2024	SULUNG JAYA 1	03/06/2024
104	B.013/PPN.PLR/PI.210/VI/2024	BUNGA MULYA PUTRI	03/06/2024
105	B.012/PPN.PLR/PI.210/VI/2024	SAMI JAYA B	03/06/2024
106	B.015/PPN.PLR/PI.210/VI/2024	SULUNG JAYA J	03/06/2024
107	B.014/PPN.PLR/PI.210/VI/2024	SAPPORO JAYA 01	03/06/2024
108	B.038/PPN.PLR/PI.210/VI/2024	SAPPORO JAYA	03/06/2024

109	B.026/PPN.PLR/PI.210/VI/2024	WAHANA JAYA	03/06/2024
110	B.048/PPN.PLR/PI.210/VII/2024	BM PUTRI 02	07/07/2024
111	B.050/PPN.PLR/PI.210/VII/2024	ANGGUN I	07/07/2024
112	B.096/PPN.PLR/PI.210/VIII/2024	BENUA INDAH 1	20/08/2024
113	B.095/PPN.PLR/PI.210/VIII/2024	BONE RAYA I	20/08/2024
114	B.094/PPN.PLR/PI.210/VIII/2024	BRIGADIR	20/08/2024
115	B.093/PPN.PLR/PI.210/VIII/2024	EMPAT BERSAUDARA A	20/08/2024
116	B.092/PPN.PLR/PI.210/VIII/2024	IMAN PUTRA	20/08/2024
117	B.091/PPN.PLR/PI.210/VIII/2024	POLEWALI JAYA	20/08/2024
118	B.090/PPN.PLR/PI.210/VIII/2024	MUTIARA 02	20/08/2024
119	B.089/PPN.PLR/PI.210/VIII/2024	SALFINA	20/08/2024
120	B.088/PPN.PLR/PI.210/VIII/2024	JABAL NUR D	20/08/2024
121	B.087/PPN.PLR/PI.210/VIII/2024	SRI ANUGRAH	20/08/2024
122	B.086/PPN.PLR/PI.210/VIII/2024	PUTRI ARMADA	20/08/2024
123	B.034/PPN.PLR/PI.210/VI/2024	FIKRI JAYA 02	03/06/2024
124	B.025/PPN.PLR/PI.210/VI/2024	FIKRI JAYA 01	03/06/2024
125	B.027/PPN.PLR/PI.210/VI/2024	FIKRI JAYA 4	03/06/2024
126	B.035/PPN.PLR/PI.210/VI/2024	MERPATI 05	03/06/2024
127	B.036/PPN.PLR/PI.210/VI/2024	MERPATI 4	03/06/2024
128	B.059/PPN.PLR/PI.210/VII/2024	RIZKI D	17/07/2024
129	B.056/PPN.PLR/PI.210/VII/2024	TIGA BERLIAN 3	17/07/2024
130	B.043/PPN.PLR/PI.210/VI/2024	AROHMAN 2	15/06/2024
131	B.060/PPN.PLR/PI.210/VII/2024	AKBAR HERU	17/07/2024
132	B.058/PPN.PLR/PI.210/VII/2024	AKBAR 2	17/07/2024
133	B.057/PPN.PLR/PI.210/VII/2024	AKBAR 4	17/07/2024
134	B.124/PPN.PLR/PI.210/X/2024	RIANA 4	14/10/2024
135	B.122/PPN.PLR/PI.210/X/2024	RIANA 3	14/10/2024
136	B.123/PPN.PLR/PI.210/X/2024	DWI JAYA 02	14/10/2024
137	B.138/PPN.PLR/PI.210/XI/2024	BRAWIJAYA	11/11/2024
138	B.134/PPN.PLR/PI.210/XI/2024	ANGGUN 02	11/11/2024
139	B.139/PPN.PLR/PI.210/XI/2024	MAULANA JAYA 04 J	11/11/2024
140	B.142/PPN.PLR/PI.210/XI/2024	SABILUL MILIK RIZKI	20/11/2024
141	B.141/PPN.PLR/PI.210/XI/2024	MERPATI 4	20/11/2024

142	B.132/PPN.PLR/PI.210/XI/2024	MERPATI 05	11/11/2024
143	B.044/PPN.PLR/PI.210/VI/2024	MEKAR INDAH 02	15/06/2024
144	B.045/PPN.PLR/PI.210/VI/2024	MEKAR INDAH 5	15/06/2024
145	B.039/PPN.PLR/PI.210/VI/2024	SAMUDRA 7	12/06/2024
146	B.001/PPN.PLR/PI.210/I/2024	UNTUKMU	29/01/2024
147	B.010/PPN.PLR/PI.210/V/2024	PUTRA CIKAL YDT 13	27/05/2024
148	B.004/PPN.PLR/PI.210/II/2024	GARUDA MAS PUTRA 04	26/02/2024
149	B.140/PPN.PLR/PI.210/XI/2024	RATIH INDAH 01	11/11/2024
150	B.009/PPN.PLR/PI.210/V/2024	SAHABAT 04 T	22/05/2024
151	B.007/PPN.PLR/PI.210/V/2024	BAGJA BAHARI 01	22/05/2024
152	B.067/PPN.PLR/PI.210/VII/2024	KARYA PUTRA 1	17/07/2024
153	B.047/PPN.PLR/PI.210/VII/2024	SINAR BINTANG 1A	07/07/2024
154	B.069/PPN.PLR/PI.210/VII/2024	RAHAYU SATU	17/07/2024
155	B.049/PPN.PLR/PI.210/VII/2024	RAHAYU DUA	07/07/2024
156	B.061/PPN.PLR/PI.210/VII/2024	HARRY JAYA	17/07/2024
157	B.064/PPN.PLR/PI.210/VII/2024	OSCAR 01	17/07/2024
158	B.070/PPN.PLR/PI.210/VII/2024	SRI MULYA 01	17/07/2024
159	B.081/PPN.PLR/PI.210/VIII/2024	JAYA BAHARI 99	01/08/2024
160	B.080/PPN.PLR/PI.210/VIII/2024	JOKER 01	01/08/2024
161	B.021/PPN.PLR/PI.210/VI/2024	CAHAYA BONE 5A	03/06/2024
162	B.011/PPN.PLR/PI.210/VI/2024	ANGGUN JAYA 1	03/06/2024
163	B.018/PPN.PLR/PI.210/VI/2024	CAHAYA BONE 4	03/06/2024
164	B.017/PPN.PLR/PI.210/VI/2024	ANGGUN JAYA - 07	03/06/2024
165	B.019/PPN.PLR/PI.210/VI/2024	BADAK LIAR 01	03/06/2024
166	B.052/PPN.PLR/PI.210/VII/2024	DEWA LAUT 02	09/07/2024
167	B.051/PPN.PLR/PI.210/VII/2024	DEWA LAUT AB	09/07/2024
168	B.046/PPN.PLR/PI.210/VI/2024	TUNAS MUDA 07	19/06/2024
169	B.082/PPN.PLR/PI.210/VIII/2024	TUNAS MUDA 6	02/08/2024
170	B.074/PPN.PLR/PI.210/VII/2024	SYAHDAN 01	26/07/2024
171	B.075/PPN.PLR/PI.210/VII/2024	CACA 20	26/07/2024
172	B.073/PPN.PLR/PI.210/VII/2024	CACA 3	26/07/2024
173	B.083/PPN.PLR/PI.210/VIII/2024	BURDAH 01	02/08/2024
174	B.084/PPN.PLR/PI.210/VIII/2024	SAMUDERA 3	02/08/2024

175	B.085/PPN.PLR/PI.210/VIII/2024	GHANI JAYA 01	04/08/2024
176	B.125/PPN.PLR/PI.210/X/2024	NURSI SARI	14/10/2024
177	B.127/PPN.PLR/PI.210/X/2024	RIZKI 06	14/10/2024
178	B.126/PPN.PLR/PI.210/X/2024	ABABIL 1	14/10/2024
179	B.133/PPN.PLR/PI.210/XI/2024	DEWI SRI	11/11/2024
180	B.137/PPN.PLR/PI.210/XI/2024	RIFQI JAYA 1	11/11/2024
181	B.135/PPN.PLR/PI.210/XI/2024	USAHA JAYA UN	11/11/2024
182	B.136/PPN.PLR/PI.210/XI/2024	OSCAR RBT 03	11/11/2024

Dengan diterbitkannya Sertifikat Kelaikan Kapal Perikanan oleh Petugas Kelaikan Kapal Perikanan PPN Palabuhanratu dapat menjadi contoh bagi kapal lain untuk melengkapi perlengkapan kapal dari segi, teknis dan nautis.

4.2.6 Sertifikat Kecakapan Nelayan

Pelaksanaan Bimbingan Teknis (Bimtek) Sertifikat Kecakapan Nelayan merupakan salah satu upaya peningkatan kapasitas sumber daya manusia di sektor perikanan. Kegiatan ini bertujuan memberikan pemahaman dan keterampilan dasar bagi nelayan dalam mengoperasikan kapal, alat tangkap, serta aspek keselamatan di laut. Melalui bimbingan ini, peserta dibekali teori maupun praktik agar mampu bekerja secara lebih profesional dan memenuhi standar yang berlaku di bidang perikanan tangkap.

Sertifikat Kecakapan Nelayan memiliki kegunaan yang sangat penting, terutama sebagai bukti kompetensi resmi bagi nelayan dalam melaksanakan aktivitas penangkapan ikan. Dengan sertifikat ini, nelayan tidak hanya diakui keterampilannya, tetapi juga dapat meningkatkan peluang untuk mendapatkan akses program pemerintah, permodalan, maupun kerjasama dengan pihak lain. Selain itu, sertifikat tersebut membantu meningkatkan keselamatan kerja dan mendukung pengelolaan sumber daya perikanan yang berkelanjutan.

Pelaksanaan Bimtek dan penerbitan Sertifikat Kecakapan Nelayan didasarkan pada Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan yang merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004, serta peraturan turunannya yang mengatur standar kompetensi nelayan. Selain itu, regulasi dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), termasuk Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan terkait sertifikasi nelayan, menjadi payung hukum dalam

implementasinya. Dengan adanya dasar hukum yang jelas, kegiatan bimbingan teknis ini dapat dilaksanakan secara berkesinambungan serta memberikan manfaat nyata bagi peningkatan profesionalitas nelayan Indonesia.



Gambar 34. Bimtek SKN PPN Palabuhanratu

Pada tahun 2024 PPN Palabuhanratu melaksanakan 4 Bimbingan Teknis Sertifikasi Kecakapan Nelayan yang dilaksanakan di Kabupaten Garut, Kabupaten Lebak, dan 2 kali di Palabuhanratu. Dari 233 nelayan yang mengikuti bimbingan teknis ini telah diterbitkan 80 sertifikat. Hal ini diakibatkan beberapa peserta diklat tidak lulus dan adanya kendala teknis pendaftaran peserta melalui aplikasi AKAPI.



Gambar 35. Bimtek SKN Aspirasi

4.2.7 Memeriksa Logbook Penangkapan Ikan

Logbook penangkapan ikan adalah laporan harian tertulis nakhoda mengenai kegiatan perikanan dan operasional harian kapal penangkap ikan. Sistem informasi *logbook* penangkapan ikan merupakan salah satu bentuk sistem pengolahan data perikanan yang digunakan dalam proses verifikasi, pengisian data (*data entry*), validasi data, analisis data, dan pengambilan kesimpulan *logbook* penangkapan ikan dengan menggunakan peralatan yang telah ditentukan. Setiap kapal yang memiliki SIPI dan melakukan kegiatan operasional penangkapan ikan wajib dilengkapi dengan *logbook* penangkapan ikan. Penerapan *logbook* penangkapan ikan sangat penting karena untuk ketelusuran ikan hasil tangkapan sehingga untuk mencegah terjadinya *IUU Fishing*. Selain itu penerapan *logbook* juga untuk mengukur tingkat kepatuhan dan ketaatan pelaku usaha/nakhoda terhadap aturan yang berlaku sehingga tidak terjadi pelanggaran baik pelanggaran alat penangkap ikan maupun wilayah operasi penangkapan ikan.

Pemeriksaan *logbook* penangkapan ikan merupakan salah satu kegiatan yang dilaksanakan oleh kelompok kesyahbandaran PPN Palabuhanratu pada tahun 2023. Pemeriksaan *logbook* penangkapan ikan meliputi:

1. Data kapal perikanan;
2. Data alat penangkapan ikan;
3. Data operasi penangkapan ikan;
4. Data ikan hasil tangkapan.

Pemeriksaan *logbook* dilaksanakan ketika kapal sandar dikolam pelabuhan dan sebelum kapal melakukan bongkar ikan hasil tangkapan. Pemeriksaan dilaksanakan sesuai mekanisme dan SOP yang berlaku di PPN Palabuhanratu. Berikut adalah SOP alur pelaksanaan pemeriksaan *logbook* penangkapan ikan.

No	Uraian Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku		
		Nakhoda	Analisis Kesyahbandaran	Syahbandar Pelabuhan Perikanan	Kelengkapan	Waktu	Output
1	Menyampaikan form <i>logbook</i> penangkapan ikan yang telah diisi sebelumnya saat kapal berlabuh				Form Log Book yang telah diisi	5 Menit	Dokumen Log Book
2	Menerima dan memeriksa kesesuaian dokumen Logbook				Dokumen Log Book	10 Menit	Log Book diverifikasi
3	Memeriksa dan memvalidasi <i>logbook</i>				Log Book diverifikasi	5 Menit	Log Book ditandatangani
4	Menginput data ke aplikasi Log Book secara on-line dan mendokumentasikan				Log Book ditandatangani	10 Menit	Aplikasi Log Book

Gambar 36. Alur SOP Pemeriksaan *Logbook* Penangkapan Ikan

Berdasarkan alur SOP lamanya pemeriksaan logbook adalah 30 menit sejak nakhoda menyerahkan data logbook penangkapan ikan. Petugas syahbandar/syahbandar melakukan pemeriksaan kesesuaian data kapal serta alat tangkap dan periode penangkapan terhadap ikan hasil tangkapan. Apabila tidak sesuai petugas meminta penjelasan kepada nakhoda, jika sudah sesuai maka kapaldapat melakukan pembokoran ikan hasil tangkapan dan petugas logbook menginputkan data logbook ke dalam aplikasi sistem informasi logbook penangkapan ikan (silopi) maupun elogbook. Syahbandar melakukan verifikasi dan validasi, apabila data sudah benar maka dilakukan pencetakan tanda terima telah lapor logbook penangkapan ikan sebagai bukti bahwa kapal sudah melaporkan logbook penangkapan ikan. Mekanisme penyampaian data logbook di PPN Palabuhanratu dilakukan dengan dengan 2 cara yaitu:

a. E-Log Book (E-LBPI)

E-Logbook merupakan suatu sistem aplikasi berbasis gadget/android untuk digunakan para nakhoda kapal penangkap ikan dalam memudahkan melaporkan hasil tangkapan ikannya secara akurat dan *real time* serta efisien. Saat ini jumlah kapal aktif yang sudah aktivasi e – logbook di PPN Palabuhanratu sebanyak 130 kapal yang rata – rata kapal ukuran diatas 30 GT. Sedikitnya jumlah kapal yang telah aktivasi e – logbook karena kapal – kapal yang berukuran diatas 30 GT yang berpangkalan atau berdomisili di PPN Palabuhanratu jumlahnya juga tidak banyak. Selain itu jumlah kapal yang paling dominan yang berdomisili di PPN Palabuhanratu merupakan kapal – kapal di bawah 5 GT yang mana belum bisa menerapkan e logbook karena salah satu syarat utama dalam penerapan e logbook adalah memiliki smartphone android. Nelayan tradisional / kecil dibawah 5 GT merasa keberatan dengan hal tersebut. Proses pengisian e logbook di tengah laut juga menjadi kendala bagi nelayan kecil/tradisional.

Untuk meningkatkan jumlah kapal yang menerapkan e – logbook , pada tahun berikutnya kelompok kesyahbandaran akan selalu menghimbau dan mensosialisasikan terhadap kapal – kapal diatas 6 GT. Salah satu tugas berat yang harus dikerjakan oleh kelompok kesyahbandaran untuk mengarahkan dan mengajak kapal – kapal ukuran diatas 6 GT untuk menerapkan e – logbook. Karena selama ini kendala utama dalam penerapan e – logbook adalah penyediaan smartphone android untuk setiap kapal yang membuat pemilik kapal atau nakhoda merasa keberatan, selain harga yang cukup mahal juga resiko rusak ketika di bawa

ke tengah laut pada saat melaksanakan operasi penangkapan ikan.

Penyampaian *e-logbook* juga lebih mudah, ketika data *e-logbook* sudah diisi maka nakhoda pada saat sampai di darat cukup mengirimkan data tersebut melalui aplikasi. Data yang terkirim akan diverifikasi kesesuaiannya oleh petugas *e-logbook*, kemudian syahbandar perikanan memvalidasi kebenaran data *e-logbook* tersebut. Sebagai bukti data *e-logbook* sudah dilaporkan, maka syahbandar menerbitkan surat tanda terima penyampaian *e-logbook*.

b. Logbook Manual

Logbook manual digunakan oleh kapal – kapal yang belum bisa menerapkan *e-logbook*. sehingga ikan hasil tangkapan yang didaratkan di PPN Palabuhanratu bisa tetap tercatat dan jelas ketelusurannya. Pengisian dan penyampaian data *logbook* pada dasarnya sama yang membedakan adalah media yang digunakan. Data *logbook* diisi pada form yang telah disediakan oleh petugas *logbook*, pada saat didarat form tersebut diserahkan kepada petugas syahbandar. Pemeriksaan kesesuaian bisa dilaksanakan ketika petugas sudah menerima form *logbook* dari nakhoda kapal, setelah diperiksa kemudian petugas *logbook* menginput data *logbook* ke dalam aplikasi sistem informasi *logbook* penangkapan ikan (silopi).

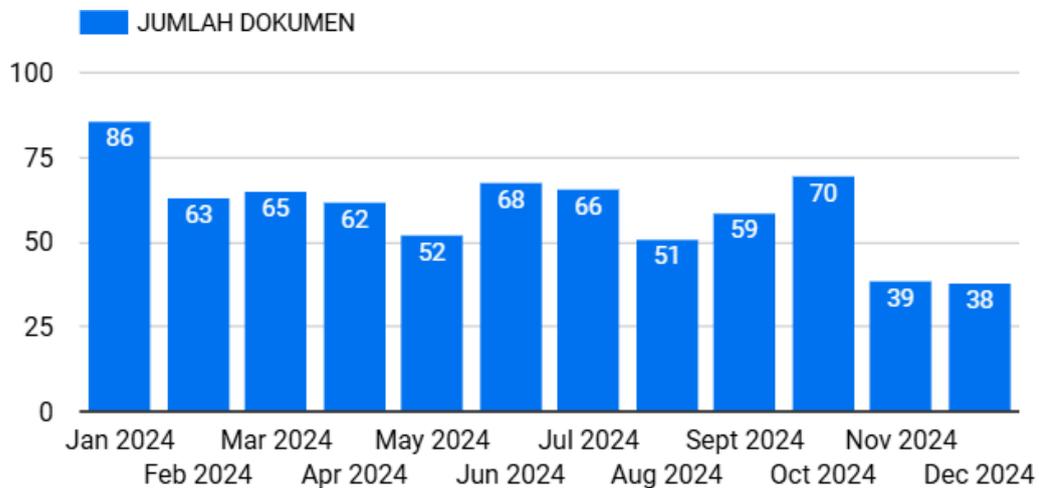
Logbook manual biasanya digunakan oleh kapal – kapal ukuran dibawah 30 GT, diharapkan pada tahun berikutnya kapal – kapal tersebut bisa menerapkan *e-logbook* yang lebih praktis dan efisien.

Meskipun sosialisasi dan himbauan penerapan *logbook* sudah dilaksanakan, tapi kesadaran pelaku usaha/nakhoda dalam melaporkan data *logbook* masih sangat rendah. Pelaporan data *logbook* pada tahun 2024 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 19. Laporan *logbook* tahun 2024

Bulan	Jumlah Dokumen	Volume Produksi (kg)
Januari	86	696.704
Februari	63	621.241
Maret	65	317.723
April	62	514.093
Mei	52	374.024
Juni	68	527.101
Juli	66	530.996
Agustus	51	480.720
September	59	639.726
Oktober	70	404.798
November	39	203.794

Bulan	Jumlah Dokumen	Volume Produksi (kg)
Desember	38	45.501
Total	719	5.335.971



Gambar 37. Jumlah Dokumen Logbook Sepanjang 2024

Dari tabel dan grafik di atas dapat dikatakan bahwa frekuensi kapal yang melaporkan *logbook* penangkapan ikan masih rendah. Karena masih kurangnya kesadaran pelaku usaha akan arti penting dari penerapan *logbook* penangkapan ikan. Selain itu naik turunnya, frekuensi kapal yang melaporkan *logbook* juga dipengaruhi oleh banyaknya kapal yang tidak melakukan operasional baik karena kondisi cuaca yang buruk maupun mengalami kerusakan atau dalam perbaikan. Pada tahun 2024 rata – rata frekuensi kapal yang melaporkan *logbook* penangkapan ikan sebanyak 60 kapal per bulan. Hal itu masih jauh dari yang diharapkan, karena tidak mencapai setengah jumlah kapal yang ada di PPN Palabuhanratu.

4.2.8 Pengawasan dan Monitoring Pelaksanaan PNBP Pasca Produksi

Pada tahun 2023 semester kedua Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia melalui Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap memulai implementasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Pasca Produksi. Sebagai salah satu komponen yang berperan dalam penerapannya, tim kesyahbandaran PPN Palabuhanratu melakukan beberapa kegiatan untuk mendukung kegiatan tersebut.

a. Sosialisasi dan Evaluasi PNBP Pasca Produksi

Dalam perjalanannya, penerapan PNBP Pasca Produksi menemui beberapa tantangan yang harus diatasi oleh tim PPN Palabuhanratu terutama tim kesyahbandaran. Selama tahun 2024, tantangan yang terdiri dari; proses migrasi, Alih Muat Kapal Pengangkut, dan penggunaan aplikasi pendukung seperti E-PIT dan lainnya. Tantangan-tantangan tersebut kami sampaikan dan luruskan pada beberapa kegiatan sosialisasi dan evaluasi.

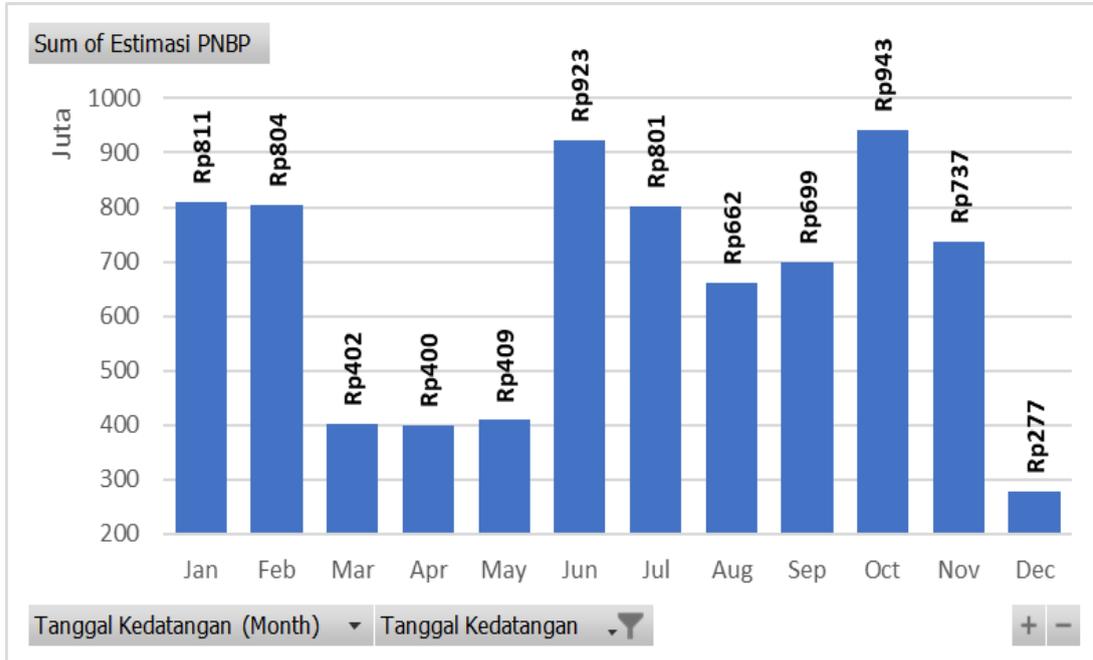


Gambar 38. Sosialisasi dan Evaluasi PNBP Pasca Produksi di PP Binuangen



Gambar 39. Sosialisasi dan Evaluasi Proses Bisnis Level 3 PNBP Pasca Produksi

b. Rekapitulasi PNBP Pascaproduksi



Gambar 40. Penerimaan PNBP Pasca Produksi Perbulan

Pendapatan PNBP Pasca Produksi pada tahun 2024 meningkat jauh diatas tahun 2024. Hal ini terjadi akibat beberapa hal seperti meningkatnya kepatuhan kapal, jumlah kapal izin daerah yang bermigrasi ke izin pusat dan juga hadirnya kapal-kapal dari daerah lain yang berpangkalan di PPN Palabuhanratu. Total PNBP Pasca Produksi pada tahun 2024 mencapai Rp. 7.868.386.730,-.

4.2.9 Penataan Area Kolam Pelabuhan

Saat ini kondisi kolam di Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu hampir menyentuh kapasitas maksimalnya. Hal ini ditenggarai oleh beberapa hal, diantaranya jumlah kapal yang banyak, pendangkalan kolam, kapal yang terbengkalai, dan area docking yang telah penuh oleh kapal mangkrak yang ditinggalkan oleh pemiliknya. Akibatnya, pelaksanaan penataan kolam pelabuhan tidak berjalan maksimal, dan menyebabkan kolam tampak kumuh karena kapal menambatkan kapalnya secara serampangan. Oleh karena itu, untuk meningkatkan kembali guna dari kolam pelabuhan, Kelompok Kesyahbandaran berinisiasi untuk melakukan pembersihan kolam dengan melaksanakan kegiatan Pengangkatan Bangkai Kapal di Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu.

Dalam pelaksanaan kegiatan ini kapal mangkrak tidak serta merta ditutuh dan diangkat dari area. Mula-mula dilakukan pendataan terhadap kepemilikan bangkai kapal yang ditinggalkan. Selanjutnya, komunikasi dengan pemilik kapal dilakukan untuk membahas metode apa yang diperlukan untuk mengangkat bangkai kapal. Jika pemilik tidak menyanggupi untuk memindahkan kapalnya sendiri, maka dilakukan kesepakatan bersama yang dituangkan dalam perjanjian bahwa tidak akan menuntut ganti rugi dalam proses penghancuran dan pemindahan kapal tersebut yang akan dilakukan oleh pihak PPN Palabuhanratu.



Gambar 41. Pengangkatan Bangkai Kapal

4.2.10 Pengukuran Kapal Perikanan

Pada tahun 2024, PPN Palabuhanratu melaksanakan kegiatan pengukuran kapal perikanan sebagai bagian dari upaya penertiban dan legalisasi dokumen kapal penangkap ikan. Kegiatan ini dilakukan bekerja sama dengan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat serta Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan (KUPP) Palabuhanratu, melalui penyelenggaraan gerai pengukuran di beberapa

titik strategis yaitu Jayanti, Ujung Genteng, dan Cisolok. Gerai pengukuran ini bertujuan mempermudah nelayan dalam memperoleh layanan tanpa harus datang langsung ke pelabuhan, sehingga proses pengukuran dapat dilakukan lebih cepat, mudah, dan dekat dengan lokasi aktivitas nelayan .

Pelaksanaan gerai pengukuran kapal perikanan tersebut mendapat respon positif dari masyarakat nelayan. Banyak pemilik kapal yang memanfaatkan kesempatan ini untuk melakukan pengukuran resmi sebagai syarat penerbitan dokumen kapal, seperti Pas Kecil maupun Surat Tanda Kebangsaan Kapal. Dengan adanya kegiatan ini, diharapkan semakin banyak kapal perikanan di wilayah Palabuhanratu dan sekitarnya yang tercatat dan terdaftar secara legal, sehingga memudahkan pengawasan, meningkatkan keselamatan pelayaran, serta mendukung ketertiban administrasi di sektor perikanan tangkap.

Selain pelaksanaan gerai pengukuran, pada tahun 2024 PPN Palabuhanratu juga telah memiliki satu orang petugas pengukur kapal penangkapan ikan metode dalam negeri. Petugas ini telah dikukuhkan secara resmi oleh Menteri Perhubungan dan Menteri Kelautan dan Perikanan, sehingga berwenang untuk melaksanakan pengukuran sesuai dengan regulasi yang berlaku. Kehadiran petugas pengukur ini menjadi langkah maju dalam memperkuat pelayanan PPN Palabuhanratu, karena proses pengukuran dapat dilakukan secara mandiri tanpa harus sepenuhnya bergantung pada tenaga pengukur dari luar instansi.

Dengan adanya kegiatan pengukuran kapal perikanan serta dukungan tenaga pengukur resmi, PPN Palabuhanratu berkomitmen untuk terus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat nelayan. Hal ini diharapkan dapat mendorong legalitas kapal penangkap ikan, memperkuat data perikanan nasional, serta mendukung tercapainya pengelolaan perikanan yang tertib, aman, dan berkelanjutan. Sinergi antar instansi pusat dan daerah dalam pelaksanaan kegiatan ini juga menjadi bukti nyata kerja sama pemerintah dalam membangun sektor perikanan yang lebih maju dan berdaya saing.



Gambar 42. Sosialisasi Pengukuran dan Pengukuran Kapal di PP.Jayanti



Gambar 43. Sosialisasi Pengukuran dan Pengukuran Kapal di Cianjur

4.3 Fasilitas Pelabuhan Perikanan

Pasal 4 Peraturan menteri Kelautan dan perikanan Nomor : Per.08/MEN/2012 tentang Kepelabuhanan Perikanan, menerangkan bahwa untuk menunjang fungsi pelabuhan perikanan, setiap pelabuhan perikanan memiliki fasilitas yang terdiri dari:

- a. fasilitas pokok
- b. fasilitas fungsional
- c. fasilitas penunjang

Kondisi fasilitas PPN Palabuhanratu sampai dengan tahun 2023 secara umum masih tergolong layak untuk dioperasikan, akan tetapi ada beberapa fasilitas yang sudah mengalami penurunan kualitas ekonomisnya dan mengalami kerusakan ringan, sedang maupun berat. Fasilitas pokok PPN Palabuhanratu yang mengalami kerusakan diantaranya adalah *breakwater* dermaga 2 mengalami kerusakan, ini sangat membahayakan apabila tidak cepat diperbaiki karena efek kedepannya dermaga 2 akan ambruk mengingat tidak ada lagi penahan gelombang air sehingga dermaga 2 akan langsung membentur gelombang dari laut, terjadinya sedimentasi di kolam 1 dan kolam 2. Sedimentasi yang terjadi pada kolam 1 dan kolam 2 akan sangat mengganggu aktivitas keluar masuk kapal. Daya tampung kapal perikanan di kolam pelabuhan sudah maksimal sehingga olah gerak dan tambat labuh kapal perikanan menjadi terganggu. Adapun fasilitas docking yang belum memadai untuk menunjang kegiatan docking sehingga penyerapan PNBP yang ada di PPN Palabuhanratu menjadi kurang maksimal.

4.3.1 Fasilitas Pokok

Fasilitas pokok merupakan infrastruktur yang diperlukan dalam kegiatan di suatu pelabuhan, fasilitas ini berfungsi untuk menjamin keamanan dan kelancaran kapal baik sewaktu berlayar keluar masuk pelabuhan maupun sewaktu berlabuh di pelabuhan. Data fasilitas pokok yang ada di Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 20. Fasilitas Pokok di Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu

FASILITAS POKOK	Volume	
Areal Pelabuhan	85,916	m ²
Kolam I Pelabuhan	30.000	m ²
Kolam II Pelabuhan	20.000	m ²

FASILITAS POKOK	Volume	
a. Dermaga I (Kedalaman -2 s/d 3 m)		
- Krib penahan sedimen	75	m
- Areal tambat labuh dan areal perbekalan	509	m
- Lampu suar masuk kolam I	2	buah
- Lampu suar tanda pelabuhan	1	buah
- Karet pender	58	buah
- Bolar	58	buah
- Akses jalan dermaga I dan II pelabuhan	900	m
- Jembatan	9,2	m
- Drainase menuju dermaga II	246	m
- Lampu penerangan solar cell	58	Unit
b. Dermaga II (Kedalaman -3 s/d 5 m)		
- Break water	669	m
- Areal tambat labuh	240	m ²
- Lampu suar masuk kolam II	1	Buah
- Karet pender	75	Unit
- Bolar	25	buah
- Alur masuk /panjang	294	m
c. Dermaga/turap areal depo pemasaran	60	m
- Akses jalan	100	m
- Drainase	50	m
d. Turap sungai Cipanyairan	373	m



Gambar 44. Areal Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu



Gambar 45. Dermaga Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu

4.3.2 Fasilitas Fungsional

Fasilitas fungsional adalah fasilitas yang berfungsi meningkatkan nilai guna dari fasilitas pokok yang dapat menunjang aktifitas di pelabuhan. Fasilitas-fasilitas ini diantaranya tidak selalu ada di suatu pelabuhan namun fasilitas ini disediakan sesuai dengan kebutuhan operasional pelabuhan perikanan tersebut. Data fasilitas fungsional yang ada di Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu dapat dilihat pada berikut:

Tabel 21. Fasilitas Fungsional di Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu

NO	FASILITAS	Volume	
1	Tempat Pelelangan Ikan	920	m ²
2	Kantor Administrasi	528	m ²
3	Drainase	200	m ²
4	Gedung Perpustakaan	56	m ²
5	Laboratorium Bina Mutu	117	m ²
6	Gedung Pengembangan Laboratorium Bina Mutu	335	m ²
7	Gedung Pelayanan Terpadu	75	m ²
8	Kantor Satuan Kerja Pengawas Perikanan	216	m ²
9	Gedung Pembinaan, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	465	m ²
10	Bangunan Bengkel Perikanan	250	m ²
11	Docking/slipway	3.300	m ²
12	TrukTangki Air	1	Unit
13	Dump Truk	2	Unit
14	Truck Sampah	2	Unit
15	Truck Crane	3	Unit

NO	FASILITAS	Volume	
16	Amphibious	1	Unit
17	Fork Lift	4	Unit
18	Perahu Angkut Sampah	1	Unit
19	Motor Angkut Sampah	4	Unit
20	Tangki BBM Solar & Rumah Pompa	320	m ³
21	Tangki BBM Solar & Rumah Pompa	208	m ³
22	Bak Tangki Air bersih & Rumah Pompa	200	m ³
23	Bangunan Water Tron Air Laut	5	m ²
24	Listrik + Instalasi	82,5	KV A
25	Genset + Instalasi	95	KV A
26	Radio SSB Syahbandar	1	unit



Gambar 46. Kantor Administrasi PPN Palabuhanratu



Gambar 47. Tempat Pelelangan Ikan Higienis PPN Palabuhanratu

4.3.3 Fasilitas Penunjang

Fasilitas penunjang adalah fasilitas yang secara tidak langsung meningkatkan peranan pelabuhan atau masyarakat perikanan untuk mendapatkan kenyamanan melakukan aktifitas di pelabuhan. Data fasilitas penunjang yang ada di Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu dapat dilihat pada berikut:

Tabel 22. Fasilitas Penunjang di Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu

NO	FASILITAS PENUNJANG	VOLUME	
1	Balai Pertemuan Nelayan	150	m ²
2	Posyandu I	60	m ²
3	Posyandu II	60	m ²
4	- Pos Peron I (Pintu Masuk Timur)	12	m ²
	- Pos Peron II (Pintu Masuk Barat)	6	m ²
5	Mesjid Nelayan	380	m ²
6	Mushola dan Toilet Dermaga II	30	m ²
7	Musholla Depo Pemasaran Ikan	108	m ²
8	Musaholla Pegawai	60	m ²
9	Toilet Dermaga I	24	m ²
10	Gedung Penyimpanan Mesin dan Jaring	60	m ²
11	Gedung Pabrik Es Curah	50	m ²
12	Gedung Pemasaran Ikan dan Resto	442	m ²
13	Gedung Depo Pemasaran Ikan	400	m ²
14	Display Informasi	1	Unit
15	Gedung Penyimpanan Keranjang Ikan	75	m ²
16	Jaringan Pipa Air Bersih 1" – 3"	1.178	m
17	Jaringan Pipa BBM (SPDN)	96	m
18	Mesin Potong Rumput		
	- Gendong	6	Unit
	- Dorong	2	Unit
19	Alat Peringatan Dini Bahaya Tsunami	1	Unit
20	Jalan dan Tempat Parkir Depan Kantor Administrasi	115	m ²
21	Tempat Parkir Mesh Karyawan dan Laboratorium	5	Unit
22	Garasi Alat Berat	200	m ²
23	Guest House	200	m ²
24	- Toko Logistik I (Kel. Genzet)	92	m ²
	- Toko Logistik II (Kel. Selatan)	74	m ²
25	Puskesmas Nelayan	6	m ²
26	Toko BAP	120	m ²
27	Rumah Dinas dan Mesh Pegawai		

NO	FASILITAS PENUNJANG	VOLUME	
	- Type 70		
	- Type 70		
	- Type 50		
	- Type 50		
	- Type 50	2	Unit
	- Type 40		
	- Type 45	6	Unit
	- Type 36	6	Unit
28	Lampu Penerangan Pelabuhan	12	Buah
29	Los Pedagang (Kel. Kandang Macan)	450	m ²
30	Lapak Pedagang 1	152	m ²
31	Lapak Pedagang 2	176	m ²
32	Bak Sampah	6	Unit
33	Mesin Pompa Air Laut	2	Unit
34	Pagar Tembok Pelabuhan	145	m ²
35	Could Storage	150	m ²
36	Pos Jaga Satpam (2)	27	m ²



Gambar 48. Gedung Pemasaran Ikan dan Resto



Gambar 49. Mesjid Nelayan

Tabel 23. Pemanfaatan Lahan dan Bangunan Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu Untuk Fasilitas Operasional Pelabuhan Tahun 2024

Fasilitas	Luas	Sat
Tempat Pelelangan Ikan	920	m ²
Areal Tambat labuh Dermaga II	240	m ²
Kantor Administrasi	528	m ²
Drainase	171	m
Gedung Perpustakaan	56	m ²
Laboratorium Bina Mutu	117	m ²
Gedung Pengembangan Laboratorium Bina Mutu	335	m ²
Gedung Pelayanan Terpadu	75	m ²
Kantor Satuan Kerja Pengawas Perikanan	216	m ²
Gedung Pembinaan, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	465	m ²
Bangunan Bengkel Perikanan	250	m ²
Docking/slipway	3,300	m ²
Areal tambat labuh dan areal perbekalan	509	m ²
Akses jalan dermaga I dan II pelabuhan	900	m
Drainase menuju dermaga II	246	m
Tangki BBM Solar & Rumah Pompa 1	320	m ³
Tangki BBM Solar & Rumah Pompa 2	208	m ³
Bak Tangki Air bersih & Rumah Pompa	200	m ²
Pegadaian	60	m ²
Bangunan Water Tron Air Laut	5	m ²
Balai Pertemuan Nelayan	150	m ²
Pos Statistik	60	m ²
Pos Pantau	60	m ²
Pos Peron I (Pintu Masuk Utara)	12	m ²

Fasilitas	Luas	Sat
Pos Peron II (Pintu Masuk Barat)	6	m ²
Mesjid Nelayan	380	m ²
Mushola dan Toilet Dermaga II	30	m ²
Tempat Perbaikan Jaring		
Musholla Depo Pemasaran Ikan	108	m ²
Musholla Pegawai	60	m ²
Toilet Dermaga I	24	m ²
Gedung Penyimpanan Mesin dan Jaring	60	m ²
Gedung Pabrik Es Flake	50	m ²
Gedung Pemasaran Ikan dan Resto	442	m ²
Gedung Depo Pemasaran Ikan	400	m ²
Tempat Parkir Depan Kantor Administrasi	115	m ²
Garasi Alat Berat	200	m ²
Guest House	200	m ²
Toko Logistik I (Kel. Genzet)	92	m ²
Toko Logistik II (Kel. Selatan)	74	m ²
Toko BAP	120	m ²
Los Pedagang (Kel. Kandang Macan)	450	m ²
Lapak Pedagang	152	m ²
Lapak Pedagang	176	m ²
Cold Storage	150	m ²
Pos Jaga Satpam (2)	27	m ²

Tabel 24. Pemanfaatan Lahan dan Bangunan Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu Untuk Industri Eksisting Tahun 2024

Nama Perusahaan	Luas	Sat
CV. Duta Ratu Pertiwi Lancar	560	m ²
CV. Jaya Mitra	78	m ²
CV. Jaya Mitra	313	m ²
PT. Surya Agung Putra Jaya	3000	m
PT. Surya Agung Putra Jaya	600	m ²
PT. Bahari Pratama Mandiri	96	m ²
PT. Mekar Tunas Raya Sejati	708	m ²
PT. AGB Tuna Jakarta	900	m ²
CV. Mitra Ratu Mandiri	144	m ²
CV. Mitra Ratu Mandiri	600	m ²
Koperasi Karyawan Mina Nusantara Palabuhanratu	60	m ²
Koperasi Karyawan Mina Nusantara Palabuhanratu	20	m ²
KUD Mandiri Sinar Laut	437	m ²
CV. Tirta Kamandanu	95	m ²

BAB V

PENUTUP

Dengan telah disusunnya Laporan Tahunan Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu Tahun 2024, diharapkan dapat digunakan sebagai bahan informasi, evaluasi dan pertimbangan dalam menetapkan kebijakan serta pengembangan bidang kelautan dan perikanan di masa mendatang dan juga sangat diharapkan dapat mendorong Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu dalam upaya untuk meningkatkan kualitas operasionalnya dalam upaya mendukung kegiatan masyarakat perikanan.